



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RDP DENGAN KEPALA BADAN POM RI**

Tahun Sidang	:	2014-2015
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke-	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Kepala Badan POM RI
Hari, Tanggal	:	Kamis, 29 Januari 2015
Waktu	:	09:36:01 WIB – 16:47:43 WIB
Tempat	:	R. Rapat Komisi IX Gd. Nusantara I Lantai I
Ketua Rapat	:	H. Syamsul Bachri, M.sc/Wakil Ketua Komisi IX
Sekretaris Rapat	:	Dra. Tri Udiartiningrum, SE/Kabag Set. Komisi IX
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan capaian kinerja atas program/kegiatan prioritas Tahun 20142. Penjelasan mengenai <i>grand design</i> penguatan kelembagaan Badan POM RI sebagai salah satu ujung tombak pembangunan kesehatan3. Kesiapan Badan POM RI dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015: khususnya bagi kemungkinan masuknya obat-obatan dan kosmetik baru dari luar negeri
Hadir	:	41 Anggota

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI :

1. Dede Yusuf Macan effendi, S.T, M.I.Pol (F-PD)
2. H. Syamsul Bachri, M.Sc (F-PG)
3. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si (F-P.Gerindra)
4. H. Asman Abnur, SE.,M.Si (F-PAN)
5. Dra. Hj. Ermalena (F-PPP)

F.PDIP :

6. Alex Indra Lukman
7. Hj. Elva Hartati, S.IP, MM
8. Ir. Ketut Sustiawan
9. Dr. Ribka Tjiptaning
10. Daniel Lumban Tobing
11. H. Imam Suroso, S.Sos, SH, MM
12. Nursuhud
13. Abidin Fikri, SH
14. Dr. Karolin Margret Natasa

F.PG :

15. Hj. Saniatul Lativa, SE
16. Hj. Dewi Asmara, SH, MH.
17. H. Budi Supriyanto, SH, MH
18. drg. Hj. Andi Fauziah Pujawatie Hatta, SKG

F.P.GERINDRA :

19. Khaidir
20. Dr. H. Suir Syam, M.Kes
21. Susi Syahdonna Bachsin, SE, MM.
22. drg. Putih Sari
23. Roberth Rouw.

F.PD :

24. Drs. H. Zulfikar Achmad
25. Siti Mufattahah, Psi.
26. Drs. Ayub Khan.
27. Dr. Verna Gladies Merry Inkiwirang
28. Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE

F.PAN :

29. Ir. H. A Riski Sadig
30. Dr. H.M. Ali Taher Parasong, SH., M.Hum

F.PKB :

31. Marwan Dasopang
32. H. Handayani, SKM
33. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA
34. Dra. Hj. Siti Masrifah, MA

F.PKS :

35. Drs. H. Chairul Anwar, Apt

F.PPP :

36. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si.
37. Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si

F.P.NASDEM :

38. Irma Suryani Chaniago, SE

39. Ir. Ali Mahir, MM
40. Amelia Anggraini.

F.P. HANURA :

41. Capt. Djoni Rolindrawan, SE.,M.MAR, MBA

ANGGOTA IZIN/SAKIT :

1. Hang Ali Saputra Syah Pahan, SH
2. Ansory Siregar, Lc

UNDANGAN :

1. DR.Ir. Roy Alexander Sparringa, M.App.Sc (Kepala BP POM beserta jajaran)

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT (H. SYAMSUL BACHRI, M.SC/F-PG):

Bisa kita mulai?

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Bismillahirrahmanirrahim.*

**Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Omswastiastu.**

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi IX,
Anggota Komisi IX,
Kepala Badan POM beserta seluruh jajaran yang kami hormati.**

Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini Komisi IX Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan POM Republik Indonesia. Sesuai dengan agenda pada hari ini kita akan mendapatkan penjelasan beberapa hal.

Yang pertama adalah penjelasan capaian kinerja atas program kegiatan prioritas POM tahun 2014.

Yang kedua penjelasan mengenai *grand design* penguatan kelembagaan Badan POM sebagai salah satu ujung tombak pembangunan kesehatan.

Yang ketiga kesiapan Badan POM dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015 khususnya bagi kemungkinan masuknya obat-obatan dan kosmetika baru dari luar negeri.

Keempat peranan Badan POM dalam mengurangi peredaran obat palsu, sub standar dan tidak berijin, kosmetika dan pangan yang mengandung bahan berbahaya.

Lima, penjelasan Badan POM terkait Revitalisasi Satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal, dan terakhir adalah terkait dengan penjelasan Badan POM terkait penerapan gerakan nasional waspada obat dan makanan ilegal atau GN-WOMI di seluruh Indonesia.

Itu kira-kira materi atau substansi yang kita minta dilaporkan oleh Badan POM di hadapan Komisi IX.

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Sampai saat ini anggota yang telah menandatangani absensi 18 anggota dan dari 9 fraksi. Oleh karena itu dengan mengucapkan *bismillahirrahmannirrahim* Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IX dan dengan Badan POM kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

RAPAT DIBUKA PUKUL 09:36:01 WIB

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Saya kira akhir-akhir ini kita ramai mendengar buah apel yang terkontaminasi atau ada bakteri. Kita juga mendengar banyak sekali produk-produk ilegal, makanan-makanan tidak sehat, produk-produk yang kadaluarsa dan lain sebagainya beredar di tengah-tengah masyarakat. Tentu badan POM sebagai institusi negara yang diberi kewenangan untuk melindungi masyarakat dari produk-produk seperti itu. Tentu ditangan POM ini kita berharap masyarakat terlindungi dari berbagai produk-produk yang membahayakan , produk-produk yang ilegal dan lain lain sebagainya. Oleh karena itu kami silakan kepada Badan POM untuk menyampaikan laporannya dan saya tawarkan *session* pertama ini kita adakan sampai dengan pukul 13, kalau kurang nanti kita tambah bisa disepakati?

(RAPAT : SETUJU)

Baik, kami persilakan kepada Kepala Badan POM untuk menyampaikan laporan dan tentu diawali dengan perkenalan jajaran Pimpinan POM . Nanti Anggota juga pada saat menyampaikan pertanyaan juga tanggapan juga diawali dengan memperkenalkan diri supaya kita bisa saling kenal, saling dekat sehingga kita bisa bersinergi didalam menjalankan tugas masing-masing. Kami persilakan kepada Kepala Badan POM untuk menyampaikan penjelasan.

Kami persilakan.

KEPALA BADAN POM (DR.IR. ROY ALEXANDER SPARRINGA, M.APP.SC):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Komisi IX 9 DPR RI dalam hal ini Bapak Syamsul Bachri, dan Ibu Ermalena dan juga para Anggota Komisi IX DPR RI yang kami hormati dan kami muliakan.

Tentu ini pertemuan yang sangat penting dan baru pertama kali kami bisa bersama-sama mengikuti RDP. Untuk itu perkenalkan kami memperkenalkan siapa yang hadir pada hari ini, pertama yang di sebelah kanan saya adalah Ibu Reri Hidayat beliau adalah Sestama (Sekretaris Utama) Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia. Dua, di sebelah kiri saya sangat tambun , sehat adalah Pak Badar Djohan Hamid, beliau adalah Deputi I yang mengurus Pengawasan Produk Terapetik dan Napza. Napza adalah narkotik psikotropik dan zat adiktif, termasuk rokok. Dan yang di ujung sebelahnya adalah Pak Suratmono beliau adalah Deputi III Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Baik, tentu kami juga bersama ini kami didampingi jajaran Eselon 2 penting yang mengikuti pada RDP hari ini. Kami tidak perkenalkan satu-persatu tetapi mereka adalah pejabat kunci terdepan dalam mengawasi obat dan makanan.

Baik, oh ya, IbuTeti adalah kepercayaan Pak Suratmono makanya didepan, beliau adalah Eselon 2, yaitu Ibu Teti Sihombing, pada saat ini beliau adalah Direktur standarisasi produk pangan dan juga *acting director* untuk inspeksi dan sertifikasi pangan yang sedang direpotkan dengan salah satunya apel. Baik.

Bapak Pimpinan dan para Anggota Komisi IX yang kami hormati.

Sesuai dengan surat Deputi Bidang Persidangan dan KSAP DPR RI yang kami terima 16 Januari bahwa agenda yang dibahas hari ini adalah yang telah disampaikan Bapak Pimpinan, ada 6 butir. Tidak perlu saya sampaikan lagi, dan kami akan menyampaikan hal-hal lainnya yang saat ini cukup topiknya panas, dan khusus mengenai apel kami akan sampaikan juga di dalam paparan pagi hari ini.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IX.

Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa tantangan Badan POM sebagai institusi pengawas obat dan makanan kedepan semakin besar dan kompleks dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari obat makanan yang berisiko bagi kesehatan masyarakat. Untuk itu kami ingin mendapatkan dukungan dalam hal kami mengembangkan kelembagaan yang kuat dan juga bekerja secara sinergis dengan *stakeholders* serta mampu menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran di bidang obat makanan yang merugikan bagi sisi perlindungan kesehatan masyarakat maupun dari sisi perekonomian nasional. Pada Rapat Dengar Pendapat kali ini akan kami paparkan secara singkat materi sesuai dengan agenda pembahasan .

Pengawasan obat dan makanan sebagai bagian integral pembangunan kesehatan di Indonesia senantiasa menghadapi lingkungan strategis yang sangat dinamis dan perubahan cepat dengan tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks dengan adanya globalisasi ekonomi, persaingan dagang serta upaya untuk melakukan perlindungan kesehatan masyarakat mempunyai konsekuensi implikasi signifikan pada sistem pengawasan obat dan makanan. Seiring dengan perkembangan IPTEK globalisasi dan meningkatnya produk impor berimplikasi terhadap bervariasinya peredaran obat dan makan di Indonesia . Disamping itu dengan adanya perbaikan taraf ekonomi masyarakat berpengaruh pada perubahan gaya hidup masyarakat berdampak signifikan terhadap pengawasan obat dan makanan.

Tantangan lain adalah peningkatan *emerging* dan *re-emerging disease*, serta perubahan masalah kesehatan gencarnya tuntutan pengamanan pasar dalam negeri , namun hal ini belum diikuti dengan peningkatan daya saing produk obat dan makanan khususnya UMKM serta masih terbatasnya sumberdaya dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Realitas ini mengharuskan Indonesia memiliki SISPOM adalah sistem pengawasan obat makanan yang efektif, efisien untuk melindungi kesehatan, keselamatan seluruh rakyat Indonesia terhadap produk-produk yang berisiko terhadap kesehatan. Bapak Ibu Pimpinan. Untuk menghadapi tantangan pengawasan tersebut Badan POM menerapkan SISPOM yang terdiri dari 3 elemen yaitu sistem pengawasan produsen, sistem pengawasan konsumen dan sistem pengawasan pemerintah.

Ini slidennya tidak sama dengan yang kami sampaikan sebelumnya tolong. Pertama, subsistem pengawasan oleh produsen pelaku usaha Jadi ada 3 yang tadi

kami sampaikan yaitu pertama pelaku usaha sistem pengawasan internal produsen yang berdasarkan pada cara pembuatan yang baik. Melalui proses ini diharapkan agar segala bentuk penyimpangan standar mutu dapat terdeteksi secara dini. Jadi ini adalah tindakan pencegahan oleh pelaku usaha produsen . Secara hukum produsen bertanggung jawab atas pengawasan mutu, keamanan produk yang mereka hasilkan. Dalam hal ini termasuk pelaku usaha itu tidak hanya produsen tetapi juga distributor, pengecer. Segala bentuk menyimpan pelanggaran dari standar yang ditetapkan dapat berdampak sangsi baik administratif maupun pidana.

Kedua, Sub sistem pengawasan oleh konsumen , sistem pengawasan masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh konsumen. Hal ini berusaha dicapai dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kualitas serta penggunaan produk secara benar. Pengawasan mandiri sangat penting dilakukan, dan ini adalah bagian yang tak kalah pentingnya dan sangat penting , untuk ini kami akan memfokuskan bagaimana melakukan edukasi memberdayakan konsumen. Ketiga adalah sub sistem pengawasan oleh pemerintah dalam hal ini Badan POM, yaitu sistem pengawasan . Kami sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melakukan pengaturan dan standarisasi, penilaian keamanan, khasiat, mutu sebelum diedarkan di pasar, inspeksi berkala, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium. Inilah kerjaan kami sehari hari untuk mengawasi obat makanan beredar, kami juga melakukan pengumuman publik serta penegakan hukum atau *law enforcement*.

Dalam meningkatkan kesejahteraan pengetahuan masyarakat terhadap keamanan, khasiat, mutu produk secara berkala dilakukan kegiatan komunikasi informasi, edukasi sebagai bagian *rest communication*. Ketiga Sub sistem pengawasan tersebut satu dengan yang lainnya saling mendukung. Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan tersebut Badan POM juga membutuhkan penguatan kelembagaan melalui dukungan legal aspek dan mandat yang jelas serta menerapkan manajemen pengawasan obat makanan berbasis resiko melalui *pre market evaluation* sebelum beredar hingga pengawasan *push market* termasuk *pharmacovigilance*.

Disamping itu Badan POM perlu didukung dengan sumber daya yang cukup meliputi sumberdaya manusia, evaluator dan inspektur yang memadai dan juga kami mempunyai tenaga penyidik pegawai negeri sipil sejumlah hampir 500 orang, dan ini penyidik pegawai negeri sipil terbesar di semua Kementerian dan lembaga yang ada di Republik ini. Tentu ini membutuhkan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum dan demikian diharapkan keamanan mutu khasiat meningkat sehingga kesehatan masyarakat daya saing juga meningkat.

Bapak Ibu Pimpinan Anggota Dewan DPR Komisi IX yang kami hormati.

Sistem pengawasan obat makanan oleh Badan POM dengan beberapa elemen saling berkaitan dan tidak terpisahkan yaitu *full spectrum* pengawasan. Dan hal ini adalah *best practice* semua dilakukan oleh Badan POM di seluruh kelas dunia. Pertama adalah kegiatan standarisasi dan regulasi merupakan suatu ketentuan teknis atau peraturan yang mengikat para pemangku pentingnya produsen, konsumen, pemerintah yang berpengaruh terhadap pasar komoditas obat dan makanan dalam menjamin terwujudnya kompetisi dagang yang sehat dan keuntungan optimal bagi konsumen. Kedua, penilaian produk sebelum beredar atau

pre market merupakan suatu elemen untuk evaluasi , menilai keamanan, manfaat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di pasar.

Ketiga, pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi push market yang terdiri dari audit dan inspeksi sarana untuk memastikan komoditi diproduksi maupun disimpan, diedarkan sesuai kaidah-kaidah baku sehingga produk yang dihasilkan dijamin aman, bermanfaat , dan bermutu.

Kemudian keempat pengawasan produk di pasar, sesuai dengan janjinya pada saat pre market ini harus dibuktikan kami harus mem-verifikasi. Untuk itu kami lakukan sampling hasil kajian resiko dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa obat makanan yang beredar keamanan, manfaat, mutunya tetap konsisten dari hasil penilaiannya sebelum beredar, disamping pengamatan terhadap berbagai resiko lainnya seperti produk ilegal termasuk palsu dan lain-lain produk-produk yang sub standar, termasuk juga kami nantinya melihat label brosur iklan produk. Ini sangat marak , tidak menyesatkan. Pengujian laboratorium juga merupakan tulang punggung pengawasan karena hasil pengujian ini merupakan diagnosis pasti tentang ada tidaknya penyimpangan dalam komposisi produk terhadap ijinnya sehingga tingkat kompetensi laboratorium harus dijamin dapat mengawal seluruh kebijakan paling mutakhir dari pengawasan obat dan makanan. Kami ingin sampaikan.

Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Bahwa Badan POM diperkuat dengan 32 laboratorium yang terakreditasi seluruhnya telah terakreditasi, di pusat PPUMN dan 32, oh 31 mohon maaf karena satu ada baru adalah laboratorium balai besar, balai POM sebar di seluruh provinsi dan seluruhnya telah terakreditasi ISO 17025. Ini adalah kebanggaan kami dan kami tidak berlebihan bahwa ini adalah lab-lab terbaik yang kita miliki di Republik Indonesia ini. *Surveillance* dimaksudkan untuk melakukan monitoring efek samping obat-obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan terakhir penyidikan kasus yang merupakan kegiatan dalam rangka menindaklanjuti kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan secara pro yustisia.

Sebagai tindak lanjut hasil pengawasan maka Badan POM dapat melakukan tindakan *law enforcement* untuk tindak lanjut pelanggaran tindak pidana di bidang obat makanan serta mengeluarkan *public warning* sebagai pemberian peringatan informasi kepada masyarakat terkait obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Bersama dengan sistem pengawasan obat dan makanan tersebut yang bersifat full spectrum serta peningkatan partisipasi publik melalui kegiatan komunikasi informasi edukasi maka diharapkan Badan POM dapat memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari produk obat makanan tidak memenuhi ketentuan. Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Dalam penyusunan Rancangan rencana strategi pengawasan obat makanan Tahun 2015- 2019 serta mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis periode rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN ketiga Tahun 2015-2019, terutama pada hal mendukung sistem pembangun nasional sub bidang kesehatan dan gizi makanan serta bidang ekonomi Badan POM telah merumuskan strategi Badan POM dalam mencapai obat dan makanan yang aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.

Yaitu pertama meningkatkan sistem pengawasan obat makanan berbasis resiko u untuk melindungi masyarakat. Kedua meningkatkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat

kemitraan dengan pemangku kepentingan. Ketiga meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM. Strategi tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan Badan POM meningkatnya jaminan obat dan makan aman, bermanfaat, bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dan kedua meningkatnya daya saing obat makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Untuk mencapai hal tersebut Badan POM perlu didukung dengan penataan kelembagaan yaitu transformasi menjadi lembaga yang memfokuskan pengawasan obat dan makanan yang berbasis risiko, sehingga mulai tahun 2014 Badan POM melakukan proses penataan kelembagaan dari segi tata laksana, struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Penataan kelembagaan tersebut diikuti dengan penyusunan kerangka regulasi yang dasari pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan Badan POM. Dalam upaya penguatan kelembagaan Badan POM perlu didukung dengan beberapa antara lain.

Pertama, penguatan kapabilitas dinamik SDM Badan POM dalam perumusan kebijakan dan kemampuan teknis operasional secara lebih luas sehingga lebih adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Kedua, pengembangan kapasitas dan kapabilitas sarana dan prasarana ya ini diikuti dengan pemutakhiran teknologi. Ketiga, penataan peran dan fungsi dalam pelaksanaan mandat kelembagaan, yaitu penguatan kantor pusat Badan POM dalam fungsi dan peran sebagai *policy centre* pengkaji, perumus, penataan kebijakan kebijakan dalam bidang pengawas obat dan makanan, penguatan pusat-pusat sebagai *center of excellent*, untuk memberikan dukungan kepada Kedeputian dalam hal pelaksanaan kajian strategic dan konseptual pertimbangan proses pengambilan keputusan tertentu, pelaksanaan kegiatan teknis dan operasional tertentu dalam pengawasan obat dan makanan, dan penguatan balai besar balai sebagai *responsibility center* dalam pelaksanaan fungsi Badan POM di daerah untuk pelaksanaan mandat pada tingkat lokal dan operasional sekaligus sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan layanan teknis dan administratif yang telah didelegasikan dari Badan POM pusat, dan juga penguatan Puspom di perbatasan dan daerah yang jauh dari ibukota provinsi. Dan keempat adalah legal aspek untuk memperkuat operasional pengawasan di lapangan.

Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota yang kami hormati.

Dalam hal ini Badan POM membutuhkan dukungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI agar perkuatan kelembagaan Badan POM dapat segera terwujud untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasional pengawasan di lapangan. Perkenankan kami untuk menyampaikan *milestone* keberhasilan Badan POM beserta jajaran baik di pusat dan di daerah sepanjang tahun 2014 yang patut disyukuri untuk peningkatan kinerja di masa depan antara lain kami telah meluncurkan 6 program unggulan pada tanggal 5 Februari 2014 yaitu e-registrasi ulang untuk obat tradisional dan suplemen kesehatan. Notifikasi pangan ekspor impor Indonesia secara cepat yang kami singkat dengan sebetulnya dalam bahasa Inggris adalah INRAS *Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed*.

Sebetulnya tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kami akan bahas khusus dalam terkait dengan kasus Apel nanti. Jadi INRAS ini sangat penting dan kami mohon ini dukungan dari Bapak Ibu bagaimana Badan POM membangun sistem bekerjasama dengan Kementerian lembaga dalam mengawasi keamanan pangan. Pusat kajian resiko pangan Indonesia atau kita sebut INARAC

ini jadi bagian penting juga , bagaimana kami menetapkan kebijakan itu di luar secara global mereka akan menanyakan apa basis ilmiahnya termasuk WTO sering memperlmasalahkan pada saat kita menetapkan kebijakan-kebijakan .

Untuk itu kita telah meluncurkan yang namanya INARAC *Indonesia Risk Assessment Center*. Di ASEAN ini Malaysia adalah koordinatornya, tetapi kami sepakat Indonesia akan lebih vokal dalam hal ini dan kita akan menjadi cukup diperhitungkan. Pemantauan efek samping obat secara elektronik atau kita sebut e-meso gerakan keamanan pangan desa atau kita biasanya menyebut food safety masuk desa ini juga program unggulan nanti 2015 kedepan, dan contact center Badan POM atau kita sebut Halo BPOM 1500-533 ini juga akses penting bagi masyarakat yang terpusat di Jakarta, di daerah pun bisa diakses untuk seluruh di wilayah seluruh Indonesia dengan ... lokal.

Untuk meningkatkan layanan informasi pengaduan konsumen terkait pengawasan obat dan makanan penghargaan yang diterima pada tahun 2014 yaitu peringkat ketiga zona hijau bidang kepatuhan lembaga pemerintah dari 36 pelayanan publik lembaga pemerintah non kelembagaan yang dinilai oleh Ombudsman Republik Indonesia meraih peringkat pertama pemeringkatan e-government Indonesia PeGI Awards kategori LPNK dari 19 peserta. Ketiga, dari hasil survei KPK Badan POM mendapat indeks integritas pengalaman dan potensi diatas standar minimal pada tanggal 1 November 2014 dimana pada tahun 2013 kami mendapat peringkat pertama. Badan POM menempati peringkat kelima website terbaik pemain atau naik satu peringkat di banding tahun lalu sebagai kementerian lembaga yang menerima penghargaan te transparency award tahun 2014. Badan POM juga terpilih menjadi salah satu lembaga pemerintah yang meraih predikat kepatuhan standar pelayanan publik , predikat kepatuhan merupakan salah satu upaya Ombudsman untuk mendorong tercapainya pelayanan publik berkualitas yaitu cepat, mudah, murah dan tepat waktu.

Secara ringkas laporan evaluasi kinerja Badan POM tahun 2014 dapat kami sampaikan seperti berikut. Pertama dalam hal penguatan pengawasan pre market melalui registrasi berbasis elektronik, pengawasan pre market dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan kajian keamanan, khasiat, manfaat dan mutu produk obat makanan sebelum produk tersebut diedarkan. Evaluasi dan kajian informasi produk dan label serta iklan dilakukan secara , dilakukan agar objektif dan tidak menyesatkan. Pengkajian pre market dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel mengacu standar pelayanan publik Badan POM berbasis bukti ilmiah dan standar yang berlaku. Selama tahun 2014 telah diterbitkan 63.000 lebih persetujuan ijin edar notifikasi yang terdiri dari 8.000 lebih produk obat, 2.000 lebih obat tradisional , 36.642 kosmetik, 812 suplemen kesehatan dan 15.392 produk pangan. Untuk meningkatkan pelayanan publik maka secara terus menerus dilakukan pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi antar lain e registration, e payment, serta mendekatkan pelayanan publik Badan POM pada pelaku usaha. Mengenai pemeriksaan sarana produksi obat makanan dilakukan agar produk obat makanan diproduksi sesuai cara pembuatan yang baik atau kita sebut GMP secara konsisten dengan ijin edar yang diberikan sehingga mencegah beredarnya obat dan makanan tidak memenuhi syarat.

Pada 2014, Badan POM telah melaksanakan pengawasan sarana produksi obat dan makanan sejumlah 4.588 sarana yang terdiri dari 109 sarana produksi obat, 499 sarana produksi obat tradisional , 299 sarana produksi kosmetik dan 3.681 sarana produksi pangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat sarana produksi 100 yang tidak memenuhi ketentuan terutama untuk

sarana produksi UMKN obat tradisional dan kosmetik. Upaya yang dilakukan Badan POM untuk mengurangi sarana tidak memenuhi ketentuan antara lain dengan meningkatkan pemahaman pelaku usaha melalui bimbingan teknis tentang pemenuhan cara produksi obat makanan yang baik termasuk hygiene dan sanitasi. Dan mulai tahun 2013 Badan POM telah melaksanakan layanan onsite untuk meningkatkan layanan publik kepada pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan dalam pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan.

Selama tahun 2014 Badan POM telah melakukan pengawasan pada 29.000 lebih sarana distribusi obat dan makanan, terdiri dari 1.505 sarana produksi obat, 2.651 sarana distribusi obat tradisional, 989 sarana distribusi suplemen kesehatan, 6.202 sarana distribusi kosmetik dan 9.681 sarana distribusi pangan. Dari hasil pemeriksaan masih ditemukan sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan antara lain karena sarana belum memiliki izin kondisi penyimpanan yang tidak memenuhi syarat sarana menyalurkan obat tradisional mengandung bahan kimia obat, tidak memiliki izin edar, dan rusak kadaluarsa sarana menyalurkan kosmetik mengandung bahan berbahaya tidak memiliki izin edar, dan rusak kadaluarsa. Hasil pengawasan tindak lanjut dengan memberikan sanksi peringatan mulai dari peringatan-peringatan keras atau penghentian sementara kegiatan bekerjasama dengan pemerintah daerah Dinas Kesehatan, dan dilakukan pemusnah produk.

Jadi ingin kami sampaikan dalam hal ini kewenangan Badan POM juga tidak artinya juga terbatas, dalam hal kita menemukan contoh di apotik kami tidak bisa menutup apotik itu. Kami harus menyampaikan kepada pemerintah daerah dan agar rekomendasi kami bisa ditindaklanjuti. Juga industri rumah tangga pangan seperti kasus yang sekarang mencuat contoh, saus tomat yang di Bandung, itu adalah industri rumah tangga pangan, dimana itu izin itu dikeluarkan pemerintah daerah. Sekali lagi Badan POM dalam hal ini tidak bisa menutup pabrik itu, kami harus sampaikan kepada pemerintah daerah apa rekomendasi yang harus dilakukan pemerintah daerah. Ini salah satu beberapa hal bahwa kewenangan Badan POM tidak luar biasa bisa mengawasi sepenuhnya yang tadi kami mengatakan *full spectrum*, bagaimana di *push market* kami menemukan tidak sepenuhnya kita bisa menangani secara langsung, harus bekerjasama dengan Kementerian lembaga termasuk dalam hal ini pemerintah daerah. Pengawasan sarana produksi dan distribusi produk narkotika, psikotropika dan prekursor, tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan 43 industri farmasi yang memproduksi narkotika, psikotropika dan prekursor. Untuk pemeriksaan sarana distribusi narkotika, psikotropika dan prekursor pada tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan di 805 sarana, selain itu juga dilakukan pemeriksaan di 4.262 sarana layanan kesehatan pengelolaan narkotik, psikotropik dan prekursor.

Dari hasil pemeriksaan masih ditemukan sarana yang tidak memenuhi ketentuan antara lain disebabkan adanya diversi dan potensi diversi narkotik, psikotropik dan prekursor ke sarana yang tidak berwenang.

Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan, peringatan-peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin pementapan sampling dan pengujian obat dan makanan beredar. Pada tahun 2014 Badan POM telah melakukan sampling dan pengujian laboratorium terhadap 62.000 845 produk obat dan makanan dengan hasil yang memenuhi syarat, yaitu 99,15% untuk obat, 85,19% untuk obat tradisional, 98,95% untuk suplemen kesehatan, 90,7% untuk kosmetik dan 91,37% untuk pangan. Produk obat tradisional yang memenuhi syarat paling rendah di

antara komoditas lainnya karena masih ditemukan produk tidak memiliki ijin edar, mengandung bahan kimia obat serta tidak memenuhi syarat mutu lainnya, karena cara penyimpanan yang belum sesuai terutama dari produk dihasilkan oleh UMKM obat tradisional.

Intensifikasi penyidikan dan tindak lanjut dalam kerangka criminal justice system sebagai upaya pemberantasan dan penertiban peredaran produk obat dan makanan ilegal termasuk palsu serta obat keras di sarana yang tidak berhak, Badan POM telah melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum dalam kerangka operasi gabungan daerah (OPGABDA) operasi gabungan nasional (OPGAPNAS), dan operasi Satgas pemberantas obat dan makanan ilegal. Selama pelaksanaan OPGABDA pada tahun 2014 ditemukan 221 kasus pelanggaran dari 258 sarana yang diperiksa dengan produk tidak murni syarat yang ditemukan, memiliki nilai keekonomian lebih dari 9 miliar rupiah. Sedangkan dalam pelaksanaan OPGAPNAS ditemukan 166 kasus pelanggaran dengan produk tidak memenuhi syarat yang ditemukan dengan total nilai keekonomian lebih dari 10 miliar rupiah. Saya rasa hampir 11 miliar itu. Dalam kerangka satuan tugas pemberantasan obat dan makanan ilegal berkoordinasi dengan international criminal police organization ICPO interpol bersama 110 negara lainnya pada tanggal 13 sampai 20 Mei 2014 melaksanakan operasi pangea yang ketujuh untuk memberantas penjualan produk ilegal termasuk palsu yang dipasarkan secara online. Di Jakarta dan 14 wilayah lainnya di Indonesia termasuk di Sumatera, Jawa, Bali Kalimantan dan Sulawesi berhasil diidentifikasi 302 situs internet yang memasarkan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan kosmetik dan sedikit juga pangan ilegal.

Dari hasil operasi tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap 58 sarana yang berhasil kami telusuri dan kami telah menyita 868 item yang terdiri dari 1.385.440 kemasan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan ilegal dengan nilai keekonomian yang mencapai 7,5 miliar rupiah hanya dalam delapan hari kami melakukan operasi serentak.

Sebagai tindak lanjut dari hasil operasi tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti dan selanjutnya 58 sarana diproses pro yustisia. Sedangkan situs Web yang telah teridentifikasi menawarkan dan memasarkan obat ilegal termasuk palsu diblokir setelah diajukan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebenarnya kami terus melakukan secara reguler situs-situs mana saja yang menjual obat-obat keras, ilegal obat kuat, kami juga melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Kominfo, dan baru-baru saja di akhir Desember 23 apotik online itu juga kita lakukan. Situsnya kita bekukan. Dengan dukungan penuh dari Kepolisian serta Direktorat Bea dan Cukai pada operasi storm kelima yang dilaksanakan pada bulan Juni, Agustus 2014 31 balai besar balai POM diseluruh wilayah Indonesia berhasil menemukan obat ilegal termasuk palsu, obat tradisional ilegal termasuk obat tradisional mengandung bahan kimia obat dan kosmetik ilegal di 150 sarana produksi dan distribusi dengan nilai keekonomian mencapai 31 miliar rupiah lebih. Dan ini sangat memprihatinkan. Pada tahun 2014 Badan POM juga telah melaksanakan pemusnahan obat makanan ilegal yang dilaksanakan di pusat balai besar balai POM diseluruh Indonesia dengan nilai lebih dari 27 miliar.

Bapak Ibu sekalian yang kami hormati.

Dalam hal pengamanan pengawasan pangan jajanan anak sekolah ini sangat penting, menjadi sorotan publik, kami akan terus lakukan , terus meningkatkan keamanan mutu gizi pangan jajanan sekolah melalui sampling pengujian laboratorium terhadap adanya penggunaan bahan berbahaya antara lain rhodamine b , borax, formalin, ... Cemaran mikroba, di sekolah dasar, madrasah, Ibtidayah. Dari hasil pengujian kami ternyata menunjukkan 77,29% memenuhi syarat, artinya 22,71% tidak memenuhi syarat.

Penyebab ini hasil analisis terakhir belum terkoreksi, karena bulan Desember belum semuanya masuk. Penyebab sampel yang tidak memenuhi syarat antara lain menggunakan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan masih terus saja, walaupun terus tertekan yang hasilnya cukup membaik adalah penggunaan formalin, tetapi masih saja karena *hygiene* sanitasi pangan jajanan anak sekolah di sekolah-sekolah masih memprihatinkan, mengandung cemaran logam berat melebihi batas maksimal, kualitas mikrobiologis tidak memenuhi syarat . Dampak aksi nasional pangan jajanan anak sekolah di perkirakan dapat melindungi selama ini karena kami sudah datang ke hampir 18.000 saya rasa lebih dari 18.000 sekolah hingga tahun 2014 selama 5 tahun ini, Kami catat 3,9 juta Siswa telah terpapar yang kami asumsikan mereka lebih tahu banyak bagaimana pangan aman serta 7,8 juta orang tua siswa, 236.000 guru SD, 236.000 pedagang BJAS ditingkat sekolah dan 71.000 pengelola kantin telah terpapar tentang keamanan pangan ini. Baik, sebagai lanjutnya kami ingin berbicara tentang informasi terkait penarikan produk apel dan apel karamel di Amerika serikat.

Mohon ijin menyampaikan karena Bapak Pimpinan tadi menyampaikan harapan bisa disampaikan. Baik, dalam hal ini oh belum disiapkan. Saya pikir sudah terintegrasikan, tolong *power pointnya*. Baik, sambil menunggu kami ingin sampaikan Badan POM yang kami tadi di awal membangun INRAS (*Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed* telah kami luncurkan, memang membutuhkan komitmen stakeholders dalam hal ini kompeten kontak , poinnya itu ada di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Perdagangan Perindustrian, dan juga kesehatan. Tentu ini akan kuat kalau kita sama-sama mempunyai persepsi dan kesiapan kekuatan yang sama. Baik ijin kami menyampaikan bagaimana informasi yang telah kami lakukan selama ini. Baik, pertama kami menerima informasi seperti kami sampaikan tadi bahwa INRAS National Contact Point adalah Badan POM.

Kami juga masuk di dalam network yang namanya *Infosan international food safety authorities network*. Dimana *emergency contact point* untuk Indonesia adalah kami. Saya adalah pertama kali pada saat saya menjabat Kasubdit di Eselon 3 dulu kami bangun itu sekitar tahun 2005 -2006 pada saat itu. Dan saat ini national medicine contact point di sana itu Pak Alim, kami menerima informasi yaitu tanggal 17 Januari , nanti mungkin di slide berikutnya nanti saja. Bahwa di sana disebutkan bahwa telah terjadi penarikan produk apel karamel.

Ya kami harus sampaikan adalah produk apel karamel atau caramel apple , yaitu happy apples , carnival, Merb's Candies dan apel segar gala dan granny smith produksi Bidart Bros. Apel segar Bidart Bros tersebut didisfusikan menurut informasi ke Indonesia, menurut informasi yang kami terima. Mohon dimundurkan lagi slidanya, akan lebih jelas di sana. Mengapa dua ini penting? Pertama, sebetulnya ini adalah CDC yang bersama dengan USDA melakukan investigasi mengapa kasus keracunan yang disebabkan listeria ini meningkat di sebelas *state*? Ada 11 negara bagian dan di sana ternyata karamel apel yang tadi saya sebutkan setelah diselidiki apalnya dari mana?

Apelnya dari *packing house* yang disebut Bidart Bros tadi.

Jadi setelah ditelusuri ini apel didistribusikan di beberapa negara, antara lain Canada, Hongkong, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Srilanka, Thailand, Emirat Arab dan Vietnam, termasuk mungkin beberapa negara yang mana mereka tidak mengetahui sejauh ini. Tapi disebutkan bahwa itu didistribusikan menurut informasi supplier Bidart Bros. Baik, lanjut *slide* berikutnya.

Nah ini adalah kronologisnya, yaitu 17 Januari Badan POM menerima informasi tersebut. 19 Januari Badan POM kami mempunyai mekanisme baku selaku national contact point, tanggal 17 Januari hari Sabtu itu, tanggal 19 Januari hari Senin kami menginformasikan notifikasi kepada seluruh kompeten kontak poin yaitu Kementerian dalam hal ini yang terkait dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan juga Badan POM sendiri yaitu di Direktorat Insert. Ya kami juga kalau pangan olahannya arena itu karamel apel tadi kan olahan jadi kami juga menyampaikan kepada Direktorat Insert.

Kemudian 20 Januari Kementerian Pertanian menelusuri importasi distribusi produk apel itu apakah masuk ke Indonesia, dan Badan POM juga telah menelusuri tidak terdapat data importasi apel karamel, happy apples, carnival, Merb's Candies yang sekarang dibicarakan di Amerika. Menurut otoritas di Amerika memang hanya diedarkan di Amerika dan Canada. 21 Januari Badan POM menerima surat dari kedutaan besar Amerika, mereka juga menyebutkan hal yang sama penarikan produk apel karamel dan apel segar gala granny smith produksi Bidart Bros Bakersfield, California. Dan itu disampaikan dan kemungkinan masuk ke kiri Indonesia.

Lanjut tanggal 23 Januari Kementerian Pertanian dalam hal ini Badan Karantina Pertanian mengirim surat kepada kedutaan besar Amerika, kami mendapatkan tembusannya akan dilakukan pengetatan terhadap produk impor apel Amerika, juga pengujian terhadap *listeria monocytogenes* ada standarnya, dan pihak Amerika juga telah menjawab dengan menerima apa yang disampaikan. Jadi apa saja tindakan Kementerian Pertanian dalam hal ini pertama adalah apel yang sekarang ada di gudang itu di tes juga oleh mereka memastikan jika sudah clear, baru boleh didistribusikan. Apel yang masuk juga diinspeksi satu persatu, karena karantina terdepan ini adalah pertanian karantina pertanian, kemudian juga Kementerian Perdagangan telah mengirim surat kepada Asosiasi Aprindo Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia untuk tidak menjual produk dimaksud yaitu Bidart Bros tadi.

Kemudian mereka juga mengambil sampel di Jabotabek, mereka juga mengambil sampel di retail-retail besar dan untuk di uji, katanya dalam beberapa hari akan keluar. Kemudian juga mengirim surat kepada Gubernur di daerah perbatasan Kalimantan Barat, dan juga Riau Kementerian Pertanian meminta Gubernur, Pemerintah Daerah setempat untuk mengawalinya kemungkinan produk ilegal masuk. Tanggal 26 Januari Kementerian Perdagangan melakukan konferensi pers dan menyampaikan larangan impor untuk produk Apel Gala, Granny Smith produksi Bidart Bros California itu sudah dilarang masuk. Dan yang di luar Bidart Bros tentu harus di cek satu persatu. Kementerian Pertanian melalui Dirjen P2HP melakukan pengambilan sampel, pengujian lab *listeria* pada apel. Dalam press release telah diunggah di website. Dan kami sampaikan juga bahwa dalam konferensi pers sebelum di konferensi pers kami rapat juga dan Kementrian Pertanian menyampaikan sejauh ini tidak ada catatan produk Apel Gala, dan

Granny Smith berasal dari Bidart Bros. Sejauh ini catatan Kementerian Pertanian mengatakan seperti itu.

Baik, kami telah menginstruksikan ke seluruh balai besar balai POM tanggal 26 Januari untuk mengawal di lapangan. Dan tentu bekerja sama dengan otoritas setempat, di mana kembali kewenangan pangan segar, buah ada di pemerintah daerah, Kalau di pusat Kementerian Pertanian. Mohon maaf, Badan POM dapat amanah adalah pangan olahan, tetapi kami berwenang untuk sampling. Untuk menguji hasilnya tidak langsung bisa kami tindaklanjuti, kami sampaikan ke Kementerian Lembaga yang berwenang. Namun kalau itu beredar kami bisa punya kewenangan mengamankan itu yang dapat, amanah yang kami terima. Lanjut, Yang ingin kami sampaikan mohon dukungan juga, isu ini terus berkembang. Kami ingin menyampaikan mengenai listeria *monocytogenes*, dan apel karamel, 2 hal berbeda. Apel karamel jelas inilah yang terbukti menyebabkan keracunan di Amerika. Mengapa demikian? Karena listeria *monocytogenes* ini dapat berkembang di suhu lemari es. Dan makanan ini apel karamel memang di serv dingin dimana listeria *monocytogenes* berkembang. Patogen ini unik, patogen ini dapat berkembang di suhu 4 derajat, 5 derajat.

Kasus keracunan di dunia rendah, namun sangat fatal buat mereka yang berdaya tahan tubuh rendah immunocompromised. Jadi ini adalah oportunistik patogen, mengapa demikian seperti mereka yang penderita HIV Aids tapi harus kami sampaikan mereka yang hamil pun ini cukup fatal, karena bisa masuk kepada plasenta dan bisa menggugurkan janin. Baik, mengapa bisa demikian? Karena apel ini di topping, karamel-karamel ini ada media makanan tentu ada gula, ada margarine, mentega dan sebagainya ini berkembang. Jadi seperti ini gambarnya, jadi ini populer, di halloween biasanya ini makanan populer di Amerika, dan di rumah tangga mereka juga sering melakukan ini, maaf di Amerika Canada, dan tidak populer di Indonesia, belum populer.

Nah ini adalah media yang baik buat listeria karena sudah ada di apelnya, maka mereka berkembang apalagi disimpan di lemari es. Ini yang harus kami sampaikan bagaimana dengan apel-apel itu? Sebetulnya dimana-mana ada listeria *monocytogenes*, itu ada di debu, ada di tanah, dilingkungan yang kotor termasuk di lemari es kita, ini berbahaya sekali. Kalau itu makanan kita menyimpan di lemari es kotor lemari kita, dan itu bisa berkembang apalagi makanan itu tidak dipanaskan ready to eat food itu berbahaya terutama bagi mereka yang rentan. Jadi ini harus disebar diinformasikan kepada masyarakat, khawatiran kita terlalu berlebih sebetulnya. Tetapi benar kita harus berhati-hati, jelas kalau apel itu jangan dikonsumsi Bidart Bros.

Baik itu yang kami sampaikan. Kita bisa lanjut kepada slide

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI IX:

Ijin Pak ketua.

Mungkin bisa di persingkat persentasinya Karena mungkin kita akan banyak untuk berdiskusi dan berdialog, terima kasih.

KEPALA BADAN POM :

Ya , terima kasih.

Kami lanjutkan. Implementasi PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang produk tembakau, kami dapat mandat untuk melakukan pengawasan label dan iklan rokok. Hal yang diamanatkan adalah bagaimana kepatuhan pencantuman picture health warning pada kemasan rokok yang beredar. Implementasi pencantuman ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu 13,44 % pada awalnya Juni 2014, terus meningkat hingga Desember 93,33 %. Kemudian pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Badan POM melalui KIE ini juga bagian yang penting, program KIE ini dilakukan melalui kegiatan berbasis komunitas untuk meningkatkan control part dan partisipasi publik. Pelaksanaan dapat dilakukan melalui pemberian informasi melalui masyarakat secara langsung, informasi media cetak, elektronik, siaran pers, *talk show*, pembagian leaflet, brosur, pameran, layanan pengaduan email, telepon, faksimile, pesan singkat, surat atau secara langsung mendatangi kantor unit pelayanan pengaduan konsumen, layanan kontak center Halo BPOM yang tadi kami sebutkan.

Kemudian pengawasan obat makanan oleh Puspom, kami mempunyai 10 Puspom, ini kami akan melakukan revitalisasi dimana Puspom ini menjadi bagian penting nantinya, akan terus kita tingkatkan yaitu di Puspom Entikong, Aruk, Atambua, Indi, Ternate, Tahuna, Tarakan, Baubau, Bima, dan Merauke. Kemudian ijin kami menyampaikan kesiapan Badan POM dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015 khususnya bagi kemungkinan masuknya obat-obatan kosmetik baru dari luar negeri. Dalam menghadapi masyarakat Ekonomi ASEAN Indonesia merupakan potensi pasar yang sangat besar dimana 40 % penduduk ASEAN lebih adalah Indonesia, hal ini dikarenakan komoditas dibawah pengawasan Badan POM merupakan komoditas yang memerlukan suatu proses regulatory untuk bisa dipasarkan.

Berbeda dengan komoditas lainnya dalam hal ini telah sesuai dengan kesempatan di negara ASEAN melalui forum ASEAN *Consultative Committee for Standard and Quality Product Working Group* untuk dukungan Badan POM terhadap peningkatan daya saing produk dalam negeri dalam rangka menghadapi Mea melalui updating regulasi berupa menciptakan iklim perekonomian yang kondusif bagi industri obat dan makanan dalam negeri dalam bentuk insentif, dan kemudahan dalam rangka peningkatan daya saing berupa penyederhanaan, perijinan dan pelayanan prima. Mendukung ekspor produk dalam negeri melalui penerbitan surat keterangan ekspor, melakukan penapisan terhadap importasi produk dan bahan baku obat dan makanan melalui penerbitan surat keterangan impor.

Sedangkan strategi Badan POM yang dilakukan adalah melakukan pengawalan sektoral, harmonisasi standar ASEAN mutual recognition arrangement, meningkatkan daya saing produk dalam negeri agar memiliki peluang ekspor yang besar. Melalui implementasi Inras yang tadi barusan saya sampaikan bagaimana secara cepat melindungi konsumen Indonesia dan meningkatkan daya saing produk nasional, mendukung kesiapan UMKM untuk meningkatkan keamanan mutu produk melalui KIE dan Bimtek, ketiga, mendukung peningkatan kompetensi industri obat makanan nasional dalam pemenuhan standar. Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami mohon dukungan, masukan dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi agar Badan

POM dapat mengawal produk obat makanan untuk dapat bersaing di forum global dan regional, ya khususnya perkuatan industri UMKM.

Bapak Pimpinan dan Anggota yang terhormat.

Masih ditemukan obat ilegal termasuk obat palsu dan sub standar di Indonesia yang disebabkan adanya tantangan permintaan atau *supply demand* di jalur ilegal dari sisi penawaran dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Pertama rendahnya putusan pengadilan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kedua belum adanya kesamaan persepsi dengan lintas sektor mengenai tingkat bahaya resiko obat palsu termasuk ilegal, dalam hal ini ilegal termasuk palsu. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha yang masih melakukan peredaran produk ilegal termasuk palsu sub standar yang karena ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan dampaknya. Sedangkan di sisi permintaan dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat karena mereka ingin yang murah, kurangnya pengetahuan kesehatan masyarakat, kemudahan akses informasi, gencarnya promosi secara tidak bertanggung jawab, dan maraknya penjualan secara *online*. Untuk meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat Badan POM mengambil langkah untuk memutus *supply demand* dengan melalui, pertama penguatan koordinasi kerjasama lintas sektor, perkuatan upaya tindak lanjut kasus pelanggaran, penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan, penguatan pengawasan push market melalui intensifikasi pengawasan barang beredar, pelaksanaan OPGABNAS, OPGABDA, operasi storm bersama interpol, operasi Pangea dan juga forum komunikasi terkait pengawasan dengan pelaku usaha.

Upaya pemutusan demand dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat melalui GN-WOMI yaitu gerakan nasional waspada obat dan makanan ilegal, penerbit public warning, pemberian informasi kepada masyarakat menjadi konsumen cerdas, peningkatan partisipasi publik melalui kader-kader, membuka akses informasi melalui halo BPOM dan website Badan POM, termasuk dengan media sosial kami akan mengawal.

Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota yang terhormat.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum kami telah membentuk satuan tugas Satgas pemberantasan obat makanan ilegal yang diketuai oleh Kepala Badan POM, satuan tugas ini terdiri kepolisian negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Kerjasama antara anggota Satgas difokuskan kepada penindakan terhadap setiap temuan pelanggaran di bidang peredaran obat makanan ilegal, penelusuran aktor pelaku pemalsuan, dan pemberian sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang tidak bertanggungjawab, pencegahan penangkalan terjadinya peredaran obat dan makanan ilegal melalui pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan konsumen cerdas dan program gerakan nasional waspada obat dan makanan ilegal. Kami juga telah melakukan revitalisasi fungsi Satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal akan terus kami lakukan yaitu perluasan kegiatan Satgas pemberantasan obat makanan ilegal hingga wilayah propinsi. Pada tahun 2014 telah terbentuk surat keputusan Satgas oleh Gubernur di 8 provinsi untuk menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemberantasan obat dan makanan ilegal di wilayahnya masing-masing. Penerbitan

Badan POM dan penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online. Kami akan terus bekerjasama dengan Kepolisian dalam hal cyber crime, Kementerian Komunikasi Informatika dan tentu tergabung dengan seluruh Satgas pemberantasan obat makanan ilegal. Hal ini sejalan dengan upaya interpol memberantas penjualan ilegal termasuk palsu dalam operasi Pangea. Kemudian keterlibatan Badan POM dengan international criminal police organization interpol dalam operasi storm. Dalam hal GN-WOMI diseluruh Indonesia ini tentu penting peredaran obat makanan ilegal masih terjadi sekali pun sejumlah upaya telah dilakukan tentu terus kita harus mencerdaskan konsumen.

Untuk itu Badan POM menginisiasi GN WOMI sebetulnya sudah terjadi dalam tahun 2013 melalui workshop , sosialisasi GN-WOMI, penyebaran informasi melalui media elektronik dan pameran.

Sebagai penutup Bapak Ibu Pimpinan Komisi IX dan Anggota yang terhormat. Di era globalisasi dan pasar bebas utamanya dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015 ini tantangan pengawasan obat dan makanan dalam lindungi masyarakat agar terhindar dalam produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat serta mengancam kesehatan memang dibutuhkan penguatan regulasi dan kelembagaan untuk mendukung tugas fungsi pengawasan kami. Memang kami akan perkuat *push market control* dan kami juga akan menapis lebih kuat lagi produk yang masuk ke Indonesia. Ini kami akan perkuat dalam memberantas peredaran obat ilegal termasuk palsu serta kosmetik dan pangan yang mengandung bahan berbahaya , Badan POM terus berupaya memperkuat mekanisme maupun sistem untuk mengoptimalkan Satgas dan GN-WOMI. Badan POM terus meningkatkan kerja sama, menggalang kerjasama sinergis antar regulator, pemerintah pusat daerah, mendorong kepatuhan pelaku usaha , meningkatkan partisipasi masyarakat. Kami akan terus menggerakkan kader fasilitator, ini adalah fokus 2015 -2019 , jadi partisipasi publik akan terus kami tingkatkan.

Demikian kami mohon dukungan Bapak Ibu Pimpinan Anggota Komisi IX atas program kerjasama Badan POM , pekerjaan kita ini sangat mulia dan tentunya membutuhkan sinergisme antara Komisi IX 9 dan Badan POM.

Terima kasih banyak atas perhatiannya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kita sampaikan kepada Kepala Badan POM Doktor Roy A. Sparingga yang telah menyampaikan laporan secara komprehensif tentang masalah-masalah yang kita hadapi yang terkait dengan pengamanan makanan, obat-obatan dan lain-lain sebagainya. Ini adalah pertemuan yang pertama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, tentu banyak sekali harapan dari anggota, pertanyaan dan juga masukan-masukan.

Oleh karena itu kita masuk pada bagian kedua dalam rapat ini yaitu pendalaman, pertanyaan dari anggota. Saat ini sudah terdaftar 14 penanya dari sebelah kiri kanan.

Kita undang yang pertama yang terhormat Bapak Handayani kami persilakan.

Terima kasih Pimpinan. Ass. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota DPR RI Komisi IX. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan POM RI beserta jajarannya.

F-PKB (H. HANDAYANI, SKM):

Nama Saya Haji Handayani Fraksi PKB A-40, Dapil Propinsi Jambi, mewakili 11 Kabupaten kota.

Dulunya pak saya pegawai negeri di Dinas Kesehatan, pernah bertugas di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan, 18 tahun pak berhenti jadi pegawai negeri. Saya sangat terharu sekali karena apa? Badan POM kita ini belum punya Undang-Undang, jadi dari tahun ke tahun hanya Surat Keputusan Presiden, yang terakhir adalah Surat Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2013. Apa tidak ada keinginan untuk menjadi Undang-undang Pak? Mungkin seandainya menjadikan Undang-undang kita akan lebih baik dan lebih optimal lagi. Dimana Badan POM ya kepanjangannya saja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Saya tidak tahu tadi itu bapak menyampaikan bahwa tidak terlibat dalam pemasokan bahan makanan dari bahan impor, tidak terlibat Badan POM untuk ini.

Ya seandainya ini memang betul-betul terjadi Pak ya tidak ada gunanya Badan POM ini, sebab yang impor itu diserahkan sama pertanian, pertanian cuma memasukkan buah-buahan atau sayuran. Pemeriksaannya harus kita pak, mungkin menurut Pimpinan perlu adanya Undang-undang masalah Badan POM ini, boleh kerjanya akan lebih baik lagi dan lebih optimal lagi. Dan juga kita karena tidak ada Undang-Undang jadi barang-barang ilegal yang dijual di pasaran atau yang sudah kadaluarsa itu itu kan cuma kita ambil disita, hukumnya tidak ada selama ini. Betul nggak pak? Nggak ada, jadi diambil, disita ya sudah, besok terjadi lagi. Kalau di daerah kota mungkin bisa, Balai POM di Kabupaten Kota bisa memeriksanya, tapi kalau diperjalanan itu banyak sekali itu Pak yang sudah *expired* yang dijual-jual itu. Masyarakat tidak tahu, masyarakat awam tidak tahu ini bisa dimakan atau tidak, pokoknya asal dijual di tempat yang bagus katanya itu bisa dimakan semua pak. Ya *Alhamdulillah* yang bapak sampaikan tadi Apel itu tidak masuk ke Indonesia tapi kalau seandainya itu masuk ke Indonesia pak, salah satu yang berdosa adalah bapak beserta jajarannya.

Yang selanjutnya bagaimana koordinasi Badan POM ini dengan Pemerintah Daerah semenjak adanya otonomi daerah ini? Sebab pemeriksaan terhadap makanan-makanan ini di daerah itu hanya pada besar, bulan puasa, Natal, cuma itu Pak, yang hari-hari biasanya tidak ada ya. Dan selanjutnya kita di TV swasta itu sering Pak melihat yang terakhir saya nonton itu sangat terenyuh sekali masalah manisan yang dicampur dengan Borax. Sering itu, tidak usah saya sampaikan TV swastanya, nanti kalau bapak nonton TV itu saya sering menonton itu pak. Formalin dicampur dengan makanan, jajanan anak-anak itu, itu buktinya ada itu di televisi itu, ada pak. Bagaimana Badan POM untuk mengatasi ini? Apabila bekerjasama dengan TV swasta tersebut untuk menindaklanjuti jangan sampai ini terjadi pak.

Saya rasa mungkin selama ini adalah, mudah-mudahan Bapak menindaklanjuti yang bapak tonton itu di televisi-televisi itu. Yang selanjutnya ini Balai POM ini kita cuma ada 33 dari 34 propinsi. Kapan kira-kira yang di Propinsi Kalimantan Utara itu ini adanya Balai POM. Mungkin bisa dipercepat Pak? Yang selanjutnya masalah ada obat-obatan yang ini namanya apa obatannya atau tidak, sistem multilevel itu

Pak. Bagaimana pengawasan kita pak ? kalau di daerah itu sangat sekali ini pak. Kalau online di TV ini ada yang langsung pak, jejaringnya banyak sekali sampai ke bawah, masyarakat sangat yakin sekali pak. Mungkin yang pertama mungkin asli pak, yang selanjutnya itu kita nggak tahu itu pak.

Mungkin itu saja pak yang dapat saya sampaikan Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih

Selanjutnya yang terhormat Ibu Nihayatul Wafiroh kami persilakan.

F-PKB (Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi semuanya.

Saya Nihayatul Wafiroh Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari Dapil Jawa Timur 3 Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso.

**Yang terhormat Pimpinan,
Wakil Pimpinan dan juga Bapak Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan.**

Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, beberapa hal juga terkait dengan yang sudah disampaikan kawan saya terdahulu Bapak Handayani tentang bagaimana hukum yang jelas bagi pelanggar, itu yang pertama.

Yang kedua soal perlindungan bagi pedagang dan konsumen pak. Jadi begini, kalau tadi ada beberapa yang sempat men-twit saya dan juga bertanya lewat media sosial tentang saya ini menjual beberapa makanan yang ternyata setelah saya jual itu termasuk barang-barang yang dilarang oleh Badan POM akhirnya saya harus merugi banyak dan sebagainya.

Jadi saya ingin bertanya kepada bapak tentang bagaimana perlindungan bagi pedagang-pedagang yang sebelumnya mereka tidak tahu bahwa barang barang yang dijualnya itu ternyata ada mengandung termasuk barang ilegal atau juga mengandung barang semacam zat-zat yang berbahaya. Terkait dengan hal ini pak, Saya ingin juga menanyakan dengan jelas bagaimana hubungan Badan POM ini dengan badan-badan lembaga yang lainnya, contohnya Ombudsman. Karena setahu saya di daerah itu Ombudsman juga mendapat banyak keluhan-keluhan dari konsumen yang terkait dengan makanan dan obat yang mereka beli. Jadi bagaimana hubungan kerjasamanya dengan Ombudsman?

Terkait dengan sosialisasi Pak tadi sudah disampaikan bahwa target untuk 2015 ini bagaimana nantinya Badan POM ini bisa lebih dikenal, partisipasi masyarakat lebih tinggi. Mungkin saya ingin mengusulkan pak tentang sosialisasi ini karena kebetulan kita-kita ini yang di Komisi IX ini sering sekali turun ke masyarakat, ke Dapil dan banyak sekali keluhan-keluhan terutama yang Komisi IX yang sudah tahu bahwasanya mitra kita salah satunya Badan POM. Kita mendapat banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat dan seperti Saya yang menjadi Anggota DPR baru kadang-kadang belum mengetahui dengan jelas apa saja program-program yang sudah dilakukan oleh Badan POM dan apa saja yang akan dilakukan oleh Badan POM ini. Nah oleh sebab itu mungkin perlu melibatkan dari Komisi IX ini dalam hal sosialisasi dan juga kepada masyarakat pak untuk sosialisasi masyarakat, bukan hanya Komisi IX tapi juga masyarakat secara umum. Terkait dengan itu tadi sudah disampaikan bahwasanya ada layanan informasi pengaduan kalau ada terkait dengan makanan dan obat ini.

Cuma saya melihat tadi layanannya baru ada Halo POM, ada website adn sebagainya, lalu bagaimana dengan masyarakat di daerah? Jadi saya berharap nanti ada layanan pengaduan ini bukan hanya tingkat di propinsi saja atau menggunakan online saja, website karena kalau di desa tidak ada website pak, HP pun juga sinyalnya biarpet juga. Jadi bagaimana itu juga melibatkan mungkin tingkat kecamatan atau mungkin tingkat desa, kepala desa dan sebagainya yang nantinya bisa langsung ditindaklanjuti karena bagi masyarakat desa itu lapor ke desa itu lebih mudah tentunya daripada harus telepon dan sebagainya. Satu lagi Pak terkait makanan olahan pak, tadi saya diskusi dengan Pak Robert ini. Jadi saya pernah berkumpul dengan beberapa ibu-ibu yang penggiat di UMKM pak, dan kebanyakan dari mereka 70% itu adalah mengolah makanan. Nah jadi bagaimana, apa yang bisa dilakukan oleh Badan POM ini untuk menjaga benar-benar kualitas dari makanan olahan ini bisa benar-benar baik dan tanpa harus mematikan dari ekonomi kreatif masyarakat tersebut. Karena kalau di masyarakat desa itu bisa menjual gorengan, bisa menjual kripik dan sebagainya itu juga sudah menjadi income yang luar biasa bagi mereka.

Terima kasih Pak.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Ibu Siti Mufattahah. Kami persilakan.

F-PD (SITI MUFATTAHAH, Psi.):

Baik.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX,

Yang saya hormati para tamu undangan hari ini yang hadir adalah Kepala Badan POM RI beserta jajarannya.

Terima kasih banyak atas kehadirannya di ruang Komisi IX dan mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa suatu kebaikan bagi kita ke depan. Bapak BPOM yang saya hormati.

Saya ingin mengawali dengan memberikan sebuah apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh BPOM ditahun 2014 terutama ya karena kita mengikuti perkembangan apa yang sudah dilakukan oleh BPOM ditahun 2014. Kurang lebihnya hal-hal yang telah dilakukan mungkin ini menjadi kita refreshing kembali tentang berbagai macam hal yang sudah dilakukan. Seperti BPOM ditahun 2014 pernah menerbitkan sekitar 82 persetujuan obat pak ya, kemudian 2.137 obat tradisional, 812 suplemen kesehatan, 15.396 pangan dan 36.642 notifikasi kosmetika, ini sebuah prestasi yang luar biasa menurut saya. Nah selama dalam satu tahun itu sudah melakukan cukup banyak hitungannya ini pak, ini berlaku untuk seluruh Indonesia ya pak ya?

Kemudian sepanjang tahun 2014 juga BPOM telah mengambil temuan beberapa bahan pangan, obat dan kosmetik ilegal dengan nilai sekitar 93 miliar, ini juga luar biasa prestasinya, saya ucapkan apresiasi kepada Badan POM yang telah melakukan hal ini dan berbagai macam temuan-temuan yang ternyata itu bisa saya nilai berarti bapak sudah bisa melakukan tugas dengan cukup baik begitu ya, tapi memang perlu ditingkatkan ditahun 2015 kedepan karena kita akan menghadapi berbagai macam era internasional pak ya.

Jadi segala hal itu akan tumpah ditahun 2015 ini masyarakat ekonomi ASEAN dan lain sebagainya itu membuat barang-barang juga dengan mudah masuk lebih banyak lagi ke negara kita. Nah untuk menghadapi hal ini saya berharap beberapa hal kepada bapak dan jajaran untuk meningkatkan pengawasan terhadap obat dan makanan terutama didaerah yang diperbatasan terutama ya pak ya, karena memang daerah-daerah situ sangat jauh dari jangkauan, mungkin bapak dan jajarannya mungkin tidak juga memiliki orang yang ditempatkan disana, pasti kantor bapak itu jauh sekali untuk menjangkau itu, tetapi tolong itu menjadi fokus perhatian bapak karena disitulah tempat makanan dan obat dari luar negeri itu bisa masuk dengan mudah.

Kemudian selain obat makanan yang dari luar negeri yang kaitannya itu dengan obat-obatan yang medis begitu ya. Juga saya mengingatkan adanya obat tradisional yang perlu diawasi obat tradisional ataupun jamu-jamuan yang marak terutama dari Cina ini, marak sekali hadir di Indonesia dan itu menjadi disukai, sangat disukai oleh masyarakat kita. Apalagi produk luar negeri, apapun itu pasti disukai, baik itu kosmetik yang katanya herbal ataupun yang lain-lainnya, tolong itu menjadi fokus utama bapak untuk memperhatikan ini. Kemudian untuk hal yang lain yang saya ingin evaluasi kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh bapak selain apa yang disampaikan tadi, ada apresiasi tapi juga ada beberapa hal yang perlu saya ketahui tentang bagaimana sebenarnya peningkatan implementasi reformasi birokrasi melalui peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja bapak, kantor bapak di tahun 2015 ke depan, kalau 2014 sudah Bapak lakukan dengan baik tetapi kami ingin mengetahui ditahun 2015 kedepan seperti apa terobosan-terobosannya.

Kemudian pengembangan tenaga pengawas obat dan makanan juga tolong ditambahkan terutama karena hal ini memang penting, tugas dari BPOM ini adalah namanya saja Badan Pengawas jadi artinya tenaga pengawas itu harus di

optimalkan. Baik itu jumlah SDM nya maupun kemampuan dari SDM itu dalam melakukan pengawasan. Kemudian peningkatan KIE yang sudah dilakukan juga perlu diperluas ditahun 2015 ini karena hal itu sangat penting mengingat berbagai macam hal yang akan dihadapi ditahun 2015 ini. Penerapan GN-WOMI di seluruh Indonesia juga perlu ditingkatkan, tolong diberikan penjelasan kepada kami gerakan-gerakan yang lebih, yang menjadi terobosan bapak dalam mengoptimalkan gerakan GN-WOMI ini Kemudian pelaksanaan program pasar aman dan bahan berbahaya sebenarnya itu program yang sangat luar biasa pak, tetapi saya melihat pelaksanaan dilapangan, kebetulan saya pernah mengikuti, bekerjasama dengan BPOM, saya lakukan di Dapil saya pada waktu itu dan ternyata gebrakannya itu tidak begitu memberikan perhatian atau tidak begitu menjadi pusat perhatian bagi masyarakat sekitar atau pedagang-pedagang yang ada disana.

Artinya mungkin metodenya yang perlu diperhatikan kembali, dievaluasi kembali apakah ada metode lain dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pasar aman ini, gebrakan pasar ini. Nah ini mohon diberikan satu perhatian terhadap hal ini. Kemudian dari presentasi Bapak saya melihat beberapa penekanan yang kaitannya dengan membutuhkan dukungan terhadap penguatan dari lembaga ini.

Nah ini juga kami sangat setuju agar BPOM ini lebih ditingkatkan, tidak hanya didukung oleh Keppres tapi juga dengan Undang-undang. Nah Undang-undang ini berarti kami juga butuh dukungan apakah BPOM sudah siap memberikan informasi atau membuat undang-undangnya sehingga kami bisa pelajari selanjutnya. Dan mudah-mudahan itu bisa memperkuat lembaga atau badan yang sedang bapak pimpin. Dasar hukumnya juga perlu diperkuat dengan adanya Undang-Undang itu. Sehingga kami berharap nanti kelembagaan dari lembaga yang bapak pimpin ini bisa sampai ke tingkat Kabupaten kota, selama ini kan masih sampai tingkat propinsi dengan balai besar bu ya . Itu memang tidak bisa menjadikan BPOM bisa bergerak leluasa ke dalam pelosok-pelosok seperti itu pelosok-pelosok pedesaan padahalkan dipelosok pedesaan itulah yang sangat penting untuk mendapatkan pemahaman tentang obat dan makanan yang baik dan aman.

Kemudian yang berikutnya adalah bentuknya sebuah harapan terhadap BPOM yaitu salah satunya harapan saya bahwa BPOM itu bisa memberikan kemudahan dalam pengurusan ijin terhadap obat yang ingin beredar begitu, obat dan makanan sesuai dengan kewenangan bapak tetapi dalam prosesnya itu mohon dipermudah birokrasinya, bukan berarti kalau itu mengandung kejelekan bahannya ya terus diijinkan, tidak , dalam artian tetapi saya berharap birokrasinya saja diperpendek, kemudian dipermudah dan prosesnya juga tidak lama. Biar mereka itu bisa mengedarkan kalau memang itu bagus dan kalau memang tidak ya mereka akan menggantinya dengan hal-hal yang memang disesuaikan dengan ketentuan yang sudah berlaku di BPOM begitu kaitan dengan kandungan-kandungan yang ada diprodukannya. Harapan berikutnya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak selama ini, mohon temuan-temuan, gebrakan-gebrakan yang sudah menjadi prestasi Bapak temuan-temuan seperti kasus-kasus dan lain sebagainya, seperti tadi apa perusahaan yang ilegal barang-barangnya dan sebagainya itu tolong benar-benar ini diperhatikan diumumkan, disebarluaskan produk-produk yang memang ditemukan oleh bapak ini mengandung kejelekan , tidak sesuai dengan ketentuan itu.

Tolong diumumkan Pak karena jangan sampai hanya diumumkan melalui website saja . Surat edaran, kemudian bisa surat edaran itu diserahkan, disebarkan disekolah, kemudian di tempat-tempat umum dan lain sebagainya itu tolong disebarkan dan tulis disitu hasil temuan BPOM. Jadi masyarakat lebih luas akan mengetahui hasil kerja Bapak dan jajarannya. Kemudian salah satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak mengenai kasus yang akhir-akhir ini marak terjadi yaitu kaitannya dengan , apa namanya itu Miras oplosan pak ya inikan sangat luar biasa pak, beberapa waktu yang lalu kita dicengangkan dengan berbagai macam kasus yang kaitannya dengan Miras oplosan.

Nah ini juga tolong kalau memang ini bagian kewenangan dari bapak , tolong ini juga dilakukan dengan baik. Memang ini pak tidak ada yang mengawasi untuk Miras oplosan ini, dan bekerjasamalah dengan instansi yang terkait kalau memang itu dibutuhkan agar meminimalisir dampak dan perluasan dari Miras oplosan ini. Kemudian yang terakhir pak kaitannya dengan bagaimana, mungkin tadi sudah disampaikan berbagai hal yang ingin bapak akan lakukan ditahun 2015, rencananya seperti itu. Tetapi saya ingin program prioritas dari bapak nantinya itu tolong diberikan menjadi highlight Bapak nanti dalam hal memberikan jawaban dan itu dijelaskan secara gamblang bagaimana strateginya, metodenya sehingga bapak bisa mewujudkan program proritas itu, terobosan-terobosan yang akan dilakukan ditahun 2015 ke depan. Dan saya harapkan dari hal anggaran dari hal anggaran proporsinya cukup bagus juga, bahwa yang pertama kaitannya dengan program dukungan manajemen bapak mengajukan sekitar 339 miliar sekian begitu pak ya kalau dari catatan ini, kemudian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPOM sekitar 28 miliar sekian, program pengawasan obat dan makanan sekitar 853 miliar sekian. Nah kalau untuk sosialisasi berada pada point ke berapa ini pak? ketiga ya? Mohon sebentar diklarifikasi dulu untuk sosialisasi pak berada pada porsi anggaran yang mana ini pak?

Tersebar di program dukungan manajemen satu dan dua? Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis, tugas teknis lainnya dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPOM begitu? Yang benar Pak? Di dukungan manajemen pengawasan obat dan makanan ya dua itu bu. Pengawasan obat dan makanan nomor tiga pak.

KEPALA BADAN POM :

Oh maaf, satu dan tiga.

F-PD (SITI MUFATTAHAH, Psi.):

Baik. Ini perlu diperjelas nanti diperinci sebenarnya untuk kinerja bapak ini kan yang kami harapkan adalah yang pertama sosialisasi , kemudian yang kedua adalah pengawasan, dua hal ini yang menjadi pokok tugas bapak yang harus dioptimalkan begitu. Nah jadi untuk sosialisasi mungkin seperti yang disampaikan oleh rekan yang lain bahwa selama ini karena bapak juga masih sampai pada balai besar di propinsi , sehingga bapak tidak bisa sampai kepada pedesaan maka kami siap untuk membantu dan bekerjasama dengan bapak, dengan jajaran bapak untuk bisa sosialisasi ke daerah-daerah pedalaman yang mohon maaf kalau di Dapil saya Garut dan Tasik pedalaman itu tidak kenal yang namanya BPOM itu pak. Makanan apa saja masuk kesana, apalagi yang dibawa oleh tukang yang kredit-kredit itu pak yang membawa kosmetik, membawa makanan

yang aneh-aneh itu pak. Nah ini juga menjadi keprihatinan saya terutama di Dapil saya itu dan pasti di Dapil yang lain juga akan mengalami hal yang sama terutama di pedalaman. Oleh karena itu kerjasama kita itu sangat dibutuhkan dan tolong pos anggaran untuk sosialisasi dimaksimalkan plus pengawasannya.

Mungkin itu Pimpinan yang ingin saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Yang selanjutnya yang terhormat Bapak M. Ali Taher kami persilakan.

F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH., M.Hum.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saudaraku Kepala BP POM dan staf.

Nama saya Muhammad Ali Taher Parasong Dapil Banten 3 Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang Nomor A-495, asli Nusa Tenggara Timur.

Saudara Pimpinan dan BP POM yang saya hormati.

Saya ada kurang lebih sekitar 12 pertanyaan, tapi karena sudah dijawab oleh teman-teman sebagian ya tinggal sedikit lah. Tadi sebagian sudah tanyakan, saya ingin membaca Republika pagi ini. Miras Oplosan tewaskan dua remaja putri di Serang, itu pengantar saja. Ini kaitan dengan lemahnya pengawasan mungkin saja oleh BP POM, tetapi tanya dulu Pak kepala ini Miras termasuk nggak dalam pengawasan saudara? Jawab dulu Pak. Ijin, langsung ya.

KEPALA BADAN POM:

Kalau untuK miras terdaftar jelas Badan POM karena ijin dari Badan POM. Namun kalau sudah oplosan itu bukan.

F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH., M.Hum.):

Yang namanya oplosan ya nggak ijin ya. Ya sudah bukan ujian pak, ini sekedar pertanyaan. Jadi saya kira pertanyaan pertama kenapa selama ini belum mengajukan Rancangan Undang-Undang atau Undang-Undang BP POM itu pertanyaan pertama. Padahal yang diawasi adalah produk-produk makanan, minuman dan lain-lain sebagainya termasuk kosmetik itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini berarti kelemahannya pada BP POM, ini kita harus jujur. Sehingga ketika menegakkan hukum apalagi sanksi-sanksi itu tidak bisa terwujud saya paham itu, saya orang hukum.

Nah oleh karena itu barangkali menurut hemat saya grand strategi kita dari Komisi IX mendukung saudara-saudara agar tahun ini selambat-lambatnya tahun depan sudah ada Undang-Undang BP POM, supaya ada kepastian di dalamnya bergerak, supaya ada sanksi pengawasan dan lain sebagainya itu lebih bagus. Ini juga terkait erat dengan persoalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah, karena saudara tidak memiliki kewenangan langsung sampai ke bawah sehingga ketika sangsi itu berjalan pengawasan tidak maksimal di lapangan. Sehingga persoalan yang sama muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi karena ada ketidakpastian hukum, kepastian hukum itu dibangun atas dasar lima pilar, kalau empat pilar Pancasila, kalau ini lima pilar.

Lima pilar, pilar pertama dasarnya mesti jelas, yang kedua prosesnya jelas, lembaga yang menanganinya jelas, kewenangannya mesti jelas, sangsi dari aturan pelaksanaannya mesti jelas, lima prinsip inilah disebut dengan prinsip-prinsip kepastian hukum. Jadi kalau saudara pengawasan ya pengawasan saja, tindakan tidak bisa akan terwujud kecuali dilimpahkan kepada pidana umum yang terkait dengan pihak kepolisian Republik Indonesia maupun pihak penyidik yang terkait. Penyidik yang 500 orang tadi itu bagi saya juga hanya penyidik temporer, tidak bisa melakukan eksekusi.

Nah oleh karena itu menurut saya *grand design* kita adalah harus menjadikan Undang-Undang susahannya dimana, mari kita bicarakan disini, nah gitu loh, supaya Saudara Kepala BPOM tidak berpikir sendiri, kasihan. Sudah kecil, tambah kecil ntar. Yang kedua dalam rangka meningkat daya saing globalisasi itu ditandai dengan 3 T, ini teori ya. Pertama adalah telekomunikasi, yang kedua adalah transportasi, ketiga adalah trade perdagangan. Saudara bisa baca itu, saya punya buku namanya melawan globalisasi. Yang ketiga dampaknya juga tiga, triple F, satu adalah food, yang kedua fashion ketiga fun. Jadi kaitan dengan globalisasi yang terkait erat langsung adalah food itu, maka menurut hemat saya kerjasamalah dengan lembaga-lembaga sektor lainnya itu betul-betul diwujudkan. Nah sekarang ini posisi BP POM itu masih sangat pasif kenapa? Karena nggak ada kadang-kadang Undang-Undang. Yang ketiga pengawasan terhadap produsen. Ini BP POM tidak bisa langsung karena dia juga ada dibawah perlindungan Departemen Perdagangan Perindustrian. Nah saudara masih pasif juga, kenapa? nggak ada undang-undangnya.

Yang keempat produk itu bukan hanya rasa aman, bermutu, bergizi tapi halal, bukan hanya halal tapi toyyib. Jadi rasa aman, bermutu, bergizi dan halal. Halalan toyyib. Halal itu dalam perspektif agama, saya itu bukan ahli agama, cuma senang ngomong saja. Halal itu artinya cara mendapatkannya cara memproduksinya, thoyib itu cara menggunakannya, halal thoyib. Halal itu artinya boleh, baik, baik yang bagaimana? baik cara mendapatkannya, baik mengolahnya. thoyib menggunakannya. Saya tersinggung ini iklan dove itu, kalau pakai bedak ini anda menjadi putih, saya tersinggung. Saya orang hitam, saya pakai terus nggak putih-putih itu. Iklan itu nggak punya etika itu.

Nah sejauh mana pengawasan dari BP POM itu, kok sekali pakai bedak bisa putih gitu loh, padahal Tuhan mengatakan bahwa kami jadikan engkau manusia itu hitam, putih, kuning, kemerah-merahan itu adalah cara Tuhan untuk menilai amal baik kalian, *Alladzi khalaqal mauta wal hayata li yabluwakum aiyukum ahsanu 'amala*, begitu. Ini apa-apa pakai ini langsung putih, enak saja, dasarnya hitam ya hitam saja, tapi kan manis kan begitu.

Nah ini ya tersinggung berat, tapi mau gimana lagi. Jadi memang orang hitam memang diskriminasi, nggak enak juga, tapi senanglah jadi orang hitam, setiap saat orang pergi haji yang direbut hajarul aswad. Lanjut ya. Kemudian kerjasama lintas sektor itu hanya yang terkait saja tapi tadi mungkin lupa juga Kementerian Luar Negeri, Kemenlu kok nggak dilibatkan? Padahal banyak sekali persoalan-persoalan ada juga atase-atase kita di luar negeri yang memerlukan kerjasama. Jadi bukan hanya Polri, Kejaksaan, Kemenlu nggak ada gimana?

Kemudian selanjutnya bagaimana kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia kaitan dengan produk-produk halal. Ya ini juga perlu mendapat perhatian bagi kita. Siapa yang menentukan halal? saya pernah mendengar istri saya pergi, maaf ini karena orang Islam itu kan dalam hal makanan dijaga betul. Ada warung kemudian istri saya masuk bersama teman-teman gurunya disitu ada tertulis halal sertifikat MUI, Ternyata mohon maaf, ada makanan makanan yang tidak halal di situ, istri saya tidak makan kemudian agak muntah di situ, kenapa? Namanya Sri Murniati, agak peka dia, agak murni-murni dia. Jadi begitu makan dia muntah, kemudian yang punya warung marah, kenapa? loh ternyata memang halal itu hanya dibuat, bukan karena sertifikat yang diberikan secara sah oleh MUI. Padahal maaf, ada makanan babinya disitu, nah maaf, kan orang Islam peka sekali begitu-begitu. Nah inilah persoalannya siapa yang mengawas sampai di situ? Ada kepalsuan memberikan ijin halal, tapi label MUI disitu tapi palsu. Aspal asli tapi palsu, mohon sampai disitu. Kemudian lanjut lagi banyak sekali ya.

Jadi saya kira sosialisasi penting, Saya ingin Pak Kepala Badan ini muncul di TV muncul di televisi dengan Ketua Komisi IX dan Wakil-wakilnya apa itu produk yang baik ini begini yang tidak itu begini, supaya ada, supaya dikenal gitu loh. Kok BP POM saya juga baru kenal ini, dulu itu yang terkenal sekali pak siapa namanya itu? Sempurna, terkenal sekali itu, karena apa, sering di TV, yang terakhir dimarahi Menteri Ibu Fadilah, dia yang mengawasi dia yang ya begitu itu lah. Jadi menurut saya kerjanya BP POM sekarang ini baik tetapi kurang dipublikasinya jadi nilainya kurang bagus maka sering-seringlah muncul di TV, jangan terlalu sering juga kalau nggak ada kerjaan. Ya jadi muncul di TV, berikan sosialisasi tetapi sosialisasinya edukatif, persuasif tidak sekedar muncul tapi muncul itu bermakna gitu loh. Saya kira ini saja yang ingin saya sampaikan tetapi kalau dikasih angka sekarang ini ya sudah baguslah. Ya A min lah, Min nya itu karena nggak ada Undang-Undang nya, kalau sudah ada Undang-undangnya berarti A plus. Jadi itu tugas Saudaraku bersama Komisi IX untuk bisa mengantarkan tahun ini dan tahun selanjutnya supaya bisa sudah ada undang-undangnya. Terakhir sekali saudaraku sekalian, kerjasama dengan Pemda itu menjadi penting, balai-balai itu bukan sekedar ada saja tapi balai-balai yang memiliki kemampuan untuk melaku riset yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akibatnya juga untuk perlindungan konsumen.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Pak Djoni Rolindrawan kami persilakan.

F-HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan serta sahabat Komisi IX,
Yang terhormat Kepala Badan dan jajarannya.**

Saya Djoni Rolindrawan dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, daerah pemilihan kota Bogor dan Kabupaten Cianjur.

Tadi sudah diborong yang saya catat disini sama Ibu Siti tadi, tapi tidak apa saya setuju sekali dengan pernyataan kepala badan bahwa tugas dari Badan POM ini sangat mulia begitu, betul. Baik lembaga, segala-segala macam seperti itu. Tadi juga dari rekan Pak Ali menegaskan tidak ada Undang-Undang gitu ya. Jadi Pimpinan mohon masuk dalam rekomendasi bahwa memang dibutuhkan Undang-Undang, dan kalau bisa memang dalam paling lambat tahun depan ya seperti itu. Jadi gini, mungkin bangsa kita itu sangat permisif, terlalu menerima, kita tahu ada pupuk palsu, obat palsu berkeliaran gitu ya terus juga timbangan yang dikurangi oleh penjual itu kayaknya di keseharian itu seolah-olah bangsa kita itu nerima saja, padahal ada instansi yang harus mengawasi gitu ya. Tapi pengawasan itu sangat lemah kalau menurut saya, tadi Pak Ali menilai A minus, kalau saya jauh dibawah itu, kenapa? Belanja obat nasional itu saya dapat data tapi mungkin bukan dari data yang itu, itu 65 triliun pak per tahun ya. Sementara tangkapan dari Badan POM itu hanya 30 miliar gitu, 30 miliar pun obat dan makanan, seperti itu.

Jadi kalau saya melihat hanya satu per mil ya bisa ditangkap daripada yang beredar seperti itu gitu. Jadi memang harus butuh penguatan kalau saja sekarang operasi gabungan yang dilaksanakan mungkin entah berapa kali, kalau perlu itu pagi, siang sore, malam gitu. Jadi supaya yang 250 juta jiwa ini terlindungi ya karena memang tadi disebutkan kami mengerti banyak kelemahan-kelemahan, kurang sarana, prasarana dukungan. Saya kira kita Komisi IX mendukung untuk penguatan lembaga termasuk juga ke Perundang-undangannya terutama karena pengawasan mungkin kalau impor memang susah karena kan sudah ada bea cukai di perbatasan-perbatasan.

Jadi memang yang *push market control* itu saya lebih setuju, jadi kalau perlu pagi, siang, sore, malam pak itu dilipat gandakan penggerebekan atau operasi apa namanya yang seperti itu gitu. Jadi hanya sekian per mil saja gitu yang bisa ketangkap, jadi diluar itu masih bebas. Nah tadi juga dikeluhkan mungkin di sini sangat santun disebutkan bahwa tantangan Badan POM dalam peredaran produk ilegal termasuk obat palsu gitu ya, ini disini disebutkan rendahnya putusan pengadilan. Mungkin saya pikir sih ini sudah ada yang sogok-sogokan, ada yang suap-suapan gitu kali, bayangkan saja 65 triliun gitu loh pak, 65 triliun nilainya sementara menurut catatan dari masyarakat Indonesia anti pembajakan itu 30% nya palsu gitu Pak, bisa bayangkan kalau 30% palsu berarti 20 triliun nilainya pertahun itu omset daripada peredaran obat palsu ini gitu.

Jadi kalau misalnya ditangkap terus oknumnya diproses hukum dibidang tadi itu lemahnya apa namanya rendahnya keputusan pengadilan tidak menimbulkan efek jera, sangat gitu karena mereka bisa bayar pengacara, bisa mereka intervensi pengadilan seperti itu. Jadi saya kira memang Komisi IX itu 250 juta jiwa menyerahkan kepada Badan POM untuk mengawasi supaya yang dimakan itu yang tadi rekan Pak Ali itu tadi bilang halalan thoyyiban seperti itu gitu. Jadi boro-boro halalan thoyyiban malahan misalnya kalau obat palsu, kalau orang beli tas

palsu dia tahu bahwa memang saya mau menghemat tapi kalau orang beli obat palsu kan saya ingin sembuh gitu tetapi rupanya obatnya palsu, saya kira akan membunuh, mungkin juga beli obatnya pinjam uangnya, seperti itu Kepala Badan ya.

Jadi mohon dipahami saya kira, memang tugas mulia itu tapi juga butuh dukungan dari kita, mohon Pimpinan kalau saja ada kasus misalnya menangkap terus memproses apalagi ada hak penyidikan gitu. Sekali-sekali libatkan kami pak, kami awasi begitu proses jalannya persidangan begitu.

Demikian saya kira.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Imam Suroso kami persilakan.

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, SH., S.Sos., MM):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Komisi IX,
Yang saya hormati Kepala Badan POM dan jajarannya Pak Dokter Roi Saparingga, selamat datang.**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.

Saya Imam Suroso A-172 dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah 3, Pati Rembang Blora Grobogan.

Yang pertama kali Pak Dokter Roi saya ucapkan selamat ulang tahun yang keempat belas semoga Badan POM tetap *exist*, sangat berguna untuk rakyat. Tepuk tangan untuk Badan POM. Kemudian yang kedua pada bulan Januari 2015 menyatakan bahwa sebanyak 583 kasus pelanggaran terkait bahan makanan dan obat-obatan ilegal, 202 kasus di antaranya telah menindaklanjuti melalui pengadilan, 14 perkara di antaranya sudah mendapatkan putusan pengadilan, sedangkan sisanya sebanyak 381 kasus ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administrasi. Pertanyaannya, terkait pemberian sanksi administrasi maka tolong dijelaskan jenis atau kualifikasi kasus seperti apa yang hanya diberi sanksi administrasi? Dan mana yang diberikan sanksi pidana? Adakah kasus yang masuk dalam kualifikasi pidana namun tidak diselesaikan melalui pengadilan dan hanya diberikan sanksi administrasi.

Nanti mohon dijelaskan, karena begini saya tahu badan POM sudah luar biasa kerja siang malam termasuk yang di propinsi-propinsi itu tapi vonis pengadilan hanya begitu saja, tidak membuat efek jera daripada perusahaan-perusahaan yang pelanggaran terhadap obat dan makanan, padahal itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Nanti tolong dijelaskan itu. Kemudian ini yang kedua Pak Badan POM

untuk kaitannya dengan Mea tahun 2015 Badan Pengawasan untuk Badan POM menyatakan akan memberikan insentif kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri agar dapat bersaing dengan pasar internasional.

Komitmen Badan POM ini bertujuan supaya industri kecil dalam negeri tetap berdaya saing dan ketahanan UMKM tetap terjaga. Nah ini pertanyaannya Pak Roi terkait dengan pemberian insentif kepada usaha mikro kecil dan menengah oleh Badan POM maka mohon dijelaskan berapa banyak usaha mikro kecil dan menengah, nanti berapa nanti dijelaskan. Kemudian ditarget oleh Badan POM untuk mendapatkan insentif, dan apakah ada kualifikasi khusus usaha mikro kecil dan menengah yang ditetapkan oleh Badan POM untuk mendapatkan insentif? Jadi saya setuju insentif itu untuk memotivasi tapi nanti mohon dijelaskan kaitannya dengan anggaran. Kemudian saya juga setuju Badan POM untuk melanjutkan program-program 2014 kemarin bahwa komisi IX ini adalah komisi kerakyatan, matanya mitranya rakyat, mitranya Badan POM Menkes kemudian Nakertrans.

Kemudian Badan POM pun kemarin sudah melakukan sosialisasi ini saya sampaikan teman-teman yang baru juga maupun yang lama itu sangat penting sekali. Makanya dalam anggaran yang baru ini saya minta dimasukkan program kerakyatan agar Badan POM yang ada di provinsi maupun pusat turun bersama dengan teman-teman yang ada di Komisi IX ini, dengan maksud dan tujuan tidak lain supaya menyelamatkan dia, menyelamatkan rakyat dari pengaruh-pengaruh makanan, obat-obatan yang berbahaya untuk mereka sendiri, berbahaya untuk keluarga, berbahaya untuk anak-anak sekolah. Kemari itu sangat antusias sekali makanya program ini tolong diperbanyak kalau perlu, sekali lagi perbanyak, masalah anggaran jangan kuatir teman-teman Komisi IX termasuk pimpinan akan mem-back up nya dari rakyat, untuk rakyat, dari rakyat POM dan untuk kepentingan rakyat.

Jadi sementara dari saya cukup itu nanti bisa kita kembangkan lagi. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Ibu Irma Chaniago. Silakan.

F-NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO, SE):

Terima kasih Pimpinan Komisi IX,.

Kawan-kawan Komisi IX yang saya hormati, Kepala Badan POM RI beserta jajarannya yang saya hormati.

Yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam rangka melakukan pengawasan BP POM menggunakan Sispom yang terdiri dari Sub Sistem pengawasan oleh produsen, oleh konsumen dan pengawasan oleh pemerintah. Disampaikan untuk menerangkan ketiga aspek tersebut oleh BP POM untuk mendapatkan dukungan dari Komisi IX karena tidak memiliki legal aspek dan

mandat yang jelas oleh BP POM. Begitu pak ya? Jadi 3 Sispom ini dijalankan tetapi belum ada legal aspek dan mandat yang jelas, kalau saya baca tadi dari paparan. Pertanyaannya, apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan tidak dapat dijadikan dasar pijakan melakukan pengawasan terutama terhadap penyimpangan bahan-bahan dasar obat dan makanan.

Jika memang itu tidak ada di dalam kedua Undang-Undang tersebut berarti Undang-Undang itu kan harus direvisi, kita bisa melakukan revisi untuk bisa mengcover hal-hal yang belum diatur oleh Undang-Undang itu sendiri. Tentunya ini akan bisa membuat kawan-kawan di BP POM memiliki dasar hukum yang jelas dalam rangka melaksanakan 3 sub sistem tadi.

Kemudian dikatakan juga sebagai tindak lanjut pengawasan BP POM dapat melakukan tindakan *law enforcement* untuk tindak pidana obat dan makanan, serta mengeluarkan *public warning*. Pertanyaannya tindakan seperti apa yang telah dilakukan BP POM terkait hal tersebut di atas dan bagaimana hasil tindakan itu? Karena perlu kami tahu setelah dilakukan tindakan itu apa out put nya dilakukan tindakan, apa hasilnya? Karena kan terulang terus kejadian-kejadian seperti itu, artinya tindakan itu tidak membuat orang jera, tidak ada efek jeranya.

Selanjutnya mengenai kasus sambal palsu yang di Bandung ini juga dikatakan oleh BP POM bahwa ini tidak BP POM Bandung ya, bahwa ini bukan tanggungjawab BP POM, ini tanggungjawab dari Pemda setempat. Jadi industri rumahan itu bukan merupakan tanggung jawab BP POM. Di koran, makanya saya sampaikan ini. Ini yang perlu saya pertanyakan, di koran dikatakan bahwa ini bukan tanggung jawab, di online juga semua sama pak, bukan merupakan tanggung jawab BP POM, merupakan tanggung jawab Pemda. Kalau terjadi demikian artinya tidak ada koordinasi yang jelas antara BP POM dengan pemda setempat, dan ini harus dilakukan perbaikan kalau memang itu benar. Karena *statement*-nya seperti itu pak, nanti boleh dicek.

Kemudian terjadi juga penyimpangan-penyimpangan pada kasus seperti, saya mau tanya ini sama bapak-bapak semua ini, kan di Carefour itu ada makanan olahan seperti otak-otak kemudian *nugget*, tapi saya merasakan ketika saya mencoba untuk beli termasuk sosisnya itu jauh sekali bedanya, otak-otaknya itu juga kan kalau kita goreng kita makan itu bau. Apakah ini pernah diuji oleh BP POM? Karena saya merasa bahwa yang dilakukan Carefour adalah mengolah makanan ini dari barang-barang yang sudah nggak laku dijual. Ikan yang sudah tidak terjual mungkin dibikin otak-otak oleh mereka, demikian juga ayam atau daging yang tidak terjual yang sudah *expired* itu diolah kemudian dijual lagi dalam bentuk kemasan Carefour. Nah ini juga tolong juga menjadi bagian yang harus diteliti, jangan karena Carefour ini besar seolah-olah bahwa sudah safe-safe saja. Tapi saya pernah melakukan itu, pernah melakukan investigasi itu bahwa itu jauh sekali. Yang namanya sosisnya juga sama berbau, dan tidak sesuai dengan rasa sosis yang sebenarnya. Kemudian mengenai kasus campuran bahan kimia obat dan obat tradisional di Indonesia yang masih marak. Ya kan jenis-jenis obat tradisional kalau tidak salah terbagi tiga, jamu, jenis obat tradisional yang belum melakukan pengujian khasiat hanya berdasarkan pengalaman turun-temurun saja, empirik. Kemudian obat herbal standard OHT merupakan obat tradisional yang telah dilakukan uji tahap pra klinik.

Nah yang ketiga adalah Fitofarmaka merupakan jenis obat tradisional yang telah melakukan pengujian sampai tahap klinik. Nah karena standarisasi yang kurang pada jamu, pada produk jamu ini sehingga menimbulkan banyak masalah,

sebaiknya BP POM ke depan membuat standarisasi untuk produk-produk ini karena ini beredar luas di masyarakat. Dan kalau orang-orang Desa itu kan kalau sakit langsung cari jamu yang biasanya nggak cari obat, nah kalau ini tidak dibenerin standarnya maka celaka kita semua.

Yang selanjutnya IKM Industri Kecil Menengah wajib distandarisasi ini namun sampai hari ini baru 20% yang distandarisasi, itupun mayoritas yang distandarisasi baru produk industri menengah, bawahnya belum, sedangkan industri kecil masih banyak yang belum terregister. Kawan-kawan di industri kecil menyatakan kepada kami bahwa kenapa mereka tidak mendaftarkan produknya? karena katanya kalau mendaftarkan itu biaya administrasinya mahal, kemudian waktu itu lama, Satu, mereka tidak punya uang untuk itu karena katanya ada oknum-oknumnya juga yang mungkin tidak tepat, nah jadi biayanya mahal, waktunya lama. Mengenai kasus barang-barang *expired*, tadi saya sudah sampaikan ini di minimarket, Alfamart, Indomaret sering berulang di setiap lebaran selalu ditemukan kasus-kasus seperti itu. Nah apa tindakan hukum BP POM terhadap produsen-produsen yang bandel seperti ini?

Terakhir pada paparan yang disampaikan Saudara Direktur POM mengharapkan dukungan Komisi IX terhadap regulasi anggaran-anggaran sarana dan prasarana. Namun tidak dijelaskan berapa sih anggaran yang dibutuhkan sebenarnya? Reguler apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang belum dilaksanakan? Kita ingin dengar ini yang sudah dilaksanakan ini sekarang program-programnya apa, yang belum-belum apa kemudian dukungan yang dibutuhkan dari kita ini apa? Kalau berupa dana berapa besar dananya? Nah karena saya lihat sampai hari ini fakta yang masih ada BP POM itu kerjanya masih pasif Pak, belum aktif. Contoh yang kasus sambal itu tadi di Bandung tidak ada koordinasi antara BP POM dengan Pemda setempat.

Nah ini kan kalau saja BP POM itu mau lebih aktif artinya koordinasi kepada pihak-pihak terkait, polisi, Pemda, kemudian juga produsennya saya yakin kasus-kasus seperti ini tidak akan berulang-ulang. Borax, kemudian apa lagi itu ya bahan-bahan berbahaya itulah yang digunakan oleh produk-produk rumahan itu mestinya bagaimana sih seharusnya diawasi, bagaimana sih seharusnya BP POM itu bertanggung jawab juga memberikan pengarahannya, memberikan masukan kepada industri-industri itu bagaimana mengolah makanan itu dengan baik, tidak hanya mengawasi tapi juga memberikan penyuluhan kepada industri-industri itu. Sehingga terjadi interaksi yang baik antara industri maupun BP POM.

Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya RDP ini baik kami sebagai wakil rakyat maupun kawan-kawan di BP POM bisa saling memberikan masukan. Kami juga berikan dukungan untuk bisa kemudian BP POM bisa menjadi lebih baik dan maksimal memberikan servisnya kepada rakyat.

Terima kasih.

*Wabillahittauhiq walhidayah,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Chairul Anwar kami persilakan.

F-PKS (Drs. H. CHAIRUL ANWAR, Apt.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang untuk kita semua.

Terima kasih Bapak Ketua Komisi.

**Ibu dan Bapak Wakil Ketua pengisi Komisi IX yang saya hormati,
Anggota Komisi IX yang saya hormati,
Kepala Badan POM dengan seluruh stafnya yang saya hormati.**

Dari pembicaraan yang disampaikan oleh Kepala Badan POM dan juga masukan dari seluruh Anggota Komisi IX paling tidak kita disitu bisa mendapatkan bahwa fungsi Badan POM ini sangat luar biasa sebetulnya, yaitu melakukan perlindungan terhadap masyarakat dalam hal obat dan makanan. Nah oleh karena itu tadi juga sudah dijabarkan barangkali masalah bagaimana perlindungan terhadap masyarakat sampai ke lini terdepan, mungkin untuk sampai ke tingkat yang lebih jauh di kampung-kampung bisa jadi itu sangat sulit ya, kalau infrastruktur dari Badan POM ini tidak memadai.

Nah oleh karena itu ada empat hal yang ingin saya sampaikan pertama berkaitan dengan anggaran. Jadi dari awal kalau nggak salah saya dulu masuk di Komisi IX ini tahun 2005 sampai sekarang itu anggarannya nggak terlalu jauh bedanya Pak. Dan kita tahu bahwa dukungan anggaran ini juga akan memperkuat fungsi, mustahil fungsinya kuat kalau pelanggarannya back up nya kecil.

Oleh karena itu kira-kira bagaimana caranya supaya pintu masuk anggaran itu menjadi kuat alasannya Pak, kontennya, karena kalau APBN itu masuk biasanya berhubungan dengan program. Jadi perlu ada terobosan sehingga back up APBN itu bisa masuk ke dalam program Badan POM. Programnya sesuai dengan fungsinya, tadinya yang diinginkan terlalu banyak itu yang diinginkan tinggal dibuat menjadi butiran-butiran program yang masuk akal, baik nanti ke Kemenkeu atau mitranya Menkes atau kita ini yang punya fungsi anggaran.

Jadi yang pertama masalah anggaran ini Pak, jadi harus ada konten yang kuat sehingga pintu masuk anggarannya juga jadi masuk logikanya gitu pak. Kita juga tidak ingin dengan fungsi yang begitu luar biasa bahkan menurut saya prestasinya juga bagus Badan POM RI ini, prestasinya juga bagus. Maka sangat penting untuk membackup Badan POM ini dari sisi anggaran. Dan ini menurut saya seluruh Anggota Komisi IX juga akan mem back up, membantu, a cuma memang logikanya harus bagus pak. Karena anggaran itu kan nggak bisa masuk lewat pintu yang programnya tidak kuat logikanya, ini yang pertama. Yang kedua, saya ulangi saja. Tadi hampir beberapa kawan masalah Undang-Undang Badan POM, mudah-mudahan di periode kepengurusan Anggota DPR yang sekarang ini bisa terwujud Pak. Karena saya ingat ini dimasukkan mulai dari tahun 2005, berarti sudah dua periode ya yang lewat, mudah-mudahan periode yang ini jangan kelewat.

Yang saya tahu di sini dulu kita dimasukkan Undang-Undang Keperawatan , masa sidang kemaren **diketok** Undang-undang Keperawatan, Nah Undang-undang Badan POM itu lebih dulu masuknya daripada Undang-Undang Keperawatan dan logikanya itu bagus dibangun oleh para perawat-perawat kita. Nah ini mungkin logika tentang Badan POM ini juga harus dibangun oleh lembaga Badan POM, ya kalau kita ini kan apa namanya tidak begitu memahami dengan jelas ya. Kita tahu fungsinya bagus, kalau misalnya dihubung-hubungkan dengan pemerintahan yang sekarang ini ada Nawa cita itu kalau saya catat poin 1, 3, 5, 6, 7 ada kaitannya. Jadi cukup kuat *back up* untuk pemerintahan yang ada sekarang. Jadi Undang-Undang Badan POM ini pak, saya pernah lihat dan pernah membahas saya ingat dulu jaman Sestamanya masih Ibu Mawar, Kepala Badan POM nya masih Pak Sampurno, sekarang ini sudah berganti. Itu Sestamanya kebetulan kawan saya itu pak, kawan kuliah.

Jadi kalau bisa ini *content* tentang pentingnya Undang-Undang Badan POM ini ini dibackup oleh Badan POM sendiri pak, kalau kita inikan secara politik saja, ya secara politik saja. Kalau nggak kuat itu bisa dipatahkan, apalagi waktu itu, saya sekarang nggak tahu ya dulu itu ada juga sedikit ketidak sinkronan antar lembaga jaman itu, ya mudah-mudahan jaman sekarang ini saling membantu gitu, karena fungsi legislasinya kan ada di DPR RI pak. Kemudian yang ketiga, begitu banyak yang sudah dikerjakan kemudian juga dipaparkan tadi luar biasa mungkin kalau saya boleh usul Pak yang *jelimet-jelimet* itu bagus kalau di simple-kan Pak, agak dipopulerkan gitu. Sehingga kawan-kawan kita disini ini menangkapnya itu gampang gitu. Karena di sini ini yang bidangnya sama dengan kawan-kawan disini ini bisa dihitung pakai jari, sisanya ada orang politik, ada orang hukum, ada orang ini. Jadi barangnya apa gitu? Terlalu ilmiah barangkali pak, coba di *simple*-kan, dipopulerkan.

Sehingga kita bisa menangkap dan orang lain juga bisa kita ajak berpikir tentang , ini penting ini perlu di *back up* gitu, ini perlu dibantu dananya dan seterusnya . Kalau bagi Anggota DPR kalau mau di *simple*-kan pak itu sederhana saja fungsi kita *back-up* anggaran sama legislasi, kalau pengawasan sudah melekat ya. Jadi tadi Ibu Irma juga sudah menyampaikan, jadi sebetulnya anggarannya berapa pak, jadi bapak ngomong panjang-panjang itu yang hubungannya sama kita apa ini, anggarannya berapa? kenapa mesti dikasih anggaran sekian gitu? Itu penting pak ya.

Kemudian yang keempat tim terakhir ini kaitannya dengan dengan infrastuktur Badan POM menurut saya sangat penting sekali. Jadi kita tugasnya luar biasa, bebannya luar biasa, anggarannya terbatas maka saya lihat salah satu pintu masuk untuk logika anggaran di di Badan POM ini adalah di Nawa cita pak, yaitu di poin 3 membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti seperti tadi yang diungkapkan masalah Pospom mungkin itu diperkuat, mungkin juga SDM nya ditambah, atau lembaga yang diperkuat, alatnya dibikin canggih, halal Haram bisa diketahui Pak, sebetulnya ada alatnya. Jaman saya kuliah saya tahu itu di POM ada, nggak tahu sekarang masih ada nggak itu alat.

Jadi diperkuat lembaga ini supaya perannya bisa kita harapkan dan bermanfaat untuk 250 juta rakyat Indonesia, tidak hanya itu kita juga butuh untuk mengawal produk-produk Indonesia supaya bisa bersaing, sebentar lagi ini kan sudah ASEAN ya masuk kemudian nanti juga internasional.

Sekian saja dari saya.

*Wabillahittaufiq walhidayah,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saya lupa memperkenalkan diri, Chairul Anwar dari daerah pemilihan Riau I A-51, Partainya Keadilan Sejahtera.
Terima kasih.

F-GERINDRA (TEGUH KHAIDIR ABDUL RAHMAN):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi IX beserta seluruh anggota yang hadir,
Yang kami hormati Bapak Kepala Badan POM Republik Indonesia beserta jajaran yang baru hadir.**

Adapun yang ingin disampaikan adalah beberapa hal berkenaan dengan kinerja daripada BP POM sendiri, bapak dan ibu sekalian.

Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Teguh Khaidir Abdul Rahman Daerah pemilihan Aceh II dari Partai Gerindra dipanggil Teuku saja. Ijin Pimpinan lanjutkan.

Yang pertama Bapak Kepala Badan adalah berkenaan dengan kinerja kita pada tahun 2014, kalau diperkenankan dan mungkin saya kira juga bolehlah disampaikan kepada Komisi IX tentang hasil evaluasi BPK apa yang sudah dicapai oleh BP POM pada tahun 2014. Kemudian yang kedua adalah dari apa yang disampaikan tadi berkenaan dengan kerja BP POM juga kita selama ini mengerjakan rutinitas yang ada di dalam kegiatan pengawasan dan kontrol dilapangan obat dan makanan. Apa solusi-solusi baru ataupun cara-cara yang mungkin bukan rutinitasnya saja yang sudah dilakukan oleh BP POM dalam 2014 dan juga akan dilaksanakan dalam 2015 kedepan. Kemudian yang ketiga, tadi sudah disinggung oleh Pak Ali Taher berkenaan dengan bagaimana kerjasama kita dengan Majelis Ulama Indonesia dalam rangka memberi label makanan halal haram pada makanan yang ada di pasaran.

Nah selama ini mungkin kita juga membaca label MUI atau label halal tetapi ternyata isi kandungan daripada produk tersebut juga sering kedapatan yang tidak halal, nah ini mohon lebih selektif manakala kerjasama antara dua lembaga ini bisa lebih efektif dan ini akan melindungi masyarakat daripada mengkonsumsi yang tidak halal. Karena kebetulan saya dari Aceh pak, kita sudah 10 tahun kena tsunami dari hasil kerja kita Komisi IX kemarin ke sana itu adalah beberapa hal yang disampaikan oleh BP POM yang pertama menyangkut peralatan yang ada di Balai Besar POM Banda Aceh itu ada beberapa hal yang kurang, sehingga salah satu yang masih kami catat dan teringat adalah berkenaan dengan bagaimana mendeteksi didalam makanan tersebut itu ada unsur lemak babinya.

Jadi di Banda Aceh itu belum tersedia alatnya, mohon kiranya menjadi catatan di BP POM agar ini bisa dikoordinasikan dengan provinsi. Selanjutnya ada sesuatu yang berubah di Aceh karena itu sentralnya di Banda Aceh pak, itu di pantai Timur kota Lhokseumawe ini dibukanya pelabuhan ekspor impor, nah melalui pelabuhan yang sudah berjalan hampir 3 tahun itu terjadi pemasokan makanan dan obat-obatan dari luar.

Nah disini belum ada balai kita yang Lhokseumawe, Aceh Utara itu belum ada balai kita yang mengontrol keluar masuknya makanan terutama makanan dan obat-obatan yang masuk dari luar, dan ini mohon perhatian dari BP POM agar dalam studi kasus ini bisa ditinjau kelokasi, hal apa yang perlu dan patut dibuat di sana.

Kami kira demikian Pimpinan yang bisa kami sampaikan menjadi perhatian kita semua, dan yang pertama tadi adalah menyangkut satu yang mungkin bisa disampaikan ke kami adalah bahwa apa yang sudah dilakukan oleh BP POM pada tahun 2014 dan apa strategi baru dalam 2015 kedepan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Khaidir.

Pak Khaidir menyebut halal haram, ada satu lagi *syubhah*, *Syubhah* itu ditengah-tengah, nggak jelas.

Baik, selanjutnya yang terhormat Ibu Okky. Silakan.

F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Komisi IX yang saya hormati.

Bapak Kepala Badan POM Republik Indonesia beserta jajarannya yang saya hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Okky Asokawati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Nomor Anggota A-513, dengan Dapil DKI II Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri. Pak Kepala Badan terima kasih atas paparannya, ada beberapa hal yang ingin saya soroti pertama mengenai penguatan kelembagaan Badan POM legal aspek untuk memperkuat operasional pengawasan di lapangan. Tadi Pak Chairul sudah menjelaskan begitu dengan baiknya bahwa memang periode lalu Komisi IX membahas Rancangan Undang-Undang Ketersediaan Farmasi itu adalah Undang-Undang yang menurut hemat kami bisa menguatkan aspek legal dari Badan POM. Karena memang sebetulnya kami berharap Badan POM ini mempunyai kekuatan yang sama seperti *food, drug administration* di Amerika begitu. Tapi sekali lagi saya hendak juga memberikan penekanan ataupun keyakinan dan *highlight* apa yang disampaikan Pak Chairul, kami memang tidak mempunyai amunisi yang cukup kuat untuk membahas hal itu.

Jadi sekali lagi memang pada kesempatan ini kami mohon agar kiranya Badan POM bisa mempersiapkan logika berpikir dari pihak Badan POM yang mana itu nanti bisa dijadikan bahan bagi kami periode yang baru ini dengan teman-teman yang baru mempunyai semangat yang baru, daya juang yang baru

dimana kalau saya amati tadi memang kami tadi melihat bahwa Badan POM itu perlu diperkuat dengan aspek legalnya ini dengan segera direalisirnya Undang-Undang tersebut. Itu Yang pertama.

Kemudian yang kedua saya hendak menyoroti masalah *mutual recognition arrangement*, ya di situ Pak Bapak mengatakan secara garis besarnya saja. Yang saya ingin tanyakan poin-poinnya itu apa sih mengenai MRA ini, dan apakah Badan POM juga akan membuat standar regional atau standar nasional buat makanan, obat, kosmetik kita sendiri begitu, di mana nanti kalau memang ada standar yang sifatnya nasional itu apakah itu juga bisa dimasukkan di dalam MRA ini. Jadi saya ingin tahu pendalaman lebih jauh mengenai MRA ini.

Lalu saya juga tertarik dengan implementasi aksi nasional PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah), karena memang itu sesuatu menurut hemat saya yang perlu disoroti begitu pak ya. Nah saya ingin tahu bagaimana dengan implementasi aksi nasional PJAS ini, diseluruh propinsi dan kapan atau bagaimana kajian mengenai program ini. Karena menurut hemat saya selain ada pembinaan dari Badan POM terhadap sekolah-sekolah, apakah Badan POM juga bisa memberikan ketegasan kepada sekolah-sekolah ketika mereka tidak lulus atau mereka tidak mengikuti dari implementasi nasional PT. JAS ini. Saya berpikir begini Pak Kepala Badan, kalau Ibu Susi punya terobosan yang *note business not as usual* ya dengan mengembom kapal misalnya, Pak Jokowi dengan hukum mati pengedar Narkoba, kira-kira bapak punya terobosan apa sih terkait dengan hal ini? betul memang Badan POM perlu kita dukung dengan merealisasinya Rancangan Undang-undang Ketersediaan Farmasi itu tetapi kira-kira terobosan apa yang bapak bisa berikan atau bapak ide untuk mempunyai pengawasan yang lebih baik.

Nah kemudian yang selanjutnya saya juga hendak menyoroti mengenai Satgas, yang mana itu terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian dan lain-lainnya. Saya ingin tahu bagaimana efektifitas dari kerja Satgas ini dan hasil besar apa yang sudah di capai? kalau memang sudah ada hasilnya mohon diserahkan kepada kami begitu, akan kami pelajari, siapa nanti juga bisa menjadi bahan bagi kami untuk sebagai logika Badan POM tadi untuk merealisir Undang-Undang tersebut. Dan yang terakhir Pak Presiden kita Pak Jokowi sudah mempunyai agenda yang strategis terkait dengan kedaulatan pangan, pertanyaan saya apa langkah Badan POM untuk menunjang agenda strategis dari pemerintah ini mengenai kedaulatan pangan, makanan karena itu juga masih merupakan wacananya Badan POM. Dan kalau misalnya Badan POM punya agenda atau ide-ide terkait untuk menunjang kedaulatan pangan ini dan itu ada kaitannya dengan anggaran, *Insyah Allah* saya yakin mungkin nanti Banggar dan teman-teman disini bisa membantu untuk meningkatkan anggaran dari Badan POM.

Itu saja Pimpinan, lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin.

*Wabillahittaufig walhidayah,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Ibu Amelia. Kami persilakan.

F-NASDEM (AMELIA ANGGRAINI):

Terima kasih pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi IX yang saya hormati,
Kepala BPOM dan jajarannya yang saya hormati.**

Perkenalkan saya Amelia Nomor Anggota A-17, mewakili Jateng VII, Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara, Fraksi Nasdem. Tadi telah banyak di sampaikan oleh beberapa rekan terkait dengan Satgas pemberantasan obat dan makanan kemudian juga mengenai tantangan pengawasan BPOM dalam menerapkan sistem pengawasan. Saya hanya ingin menambahkan saja Pak Kepala BPOM untuk menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan, BPOM kan menerapkan sistem pengawasan yang terdiri dari sub sistem pengawasan produsen.

Nah terkait dengan subsistem pengawasan produsen ini apa yang menjadi sebagaimana yang telah ditanyakan oleh rekan Ibu Okky tadi apa yang menjadi kriteria standar mutu dan bagaimana, yang paling penting bagaimana membuat sistem pencegahan dini yang efektif untuk menghindari segala bentuk penyimpangan mutu produk yang dihasilkan oleh produsen, dan saya juga ingin tahu apa saja hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan. Tadi telah disampaikan juga oleh rekan Ibu Irma mengenai dari temuan pabrik saos di Bandung.

Nah banyak, ada banyak pabrik-pabrik semacam ini gitu. Nah selama ini apakah Badan POM mengetahui keberadaan pabrik-pabrik tersebut, kemudian juga apakah sudah dilakukan tahapan pengawasan terpadu baik secara preventif maupun represif dengan tindakan hukum yang tegas. Jadi saya mohon penjelasannya.

Demikian.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Robert Rouw silakan.

F-GERINDRA (ROBERTH ROUW):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

**Yang saya hormati Pimpinan dan para Anggota Komisi IX,
Yang saya hormati Kepala Badan POM Republik Indonesia.**

Nama saya Robert Rouw dari dapil Papua, yang mewakili 29 Kabupaten Kota. Saudara Kepala Badan POM, kenapa saya sebutkan tadi 29 Kabupaten kota? Satu Dapil itu pak. Menurut saya kehadiran Bapak mewakili negara untuk menjamin warganegara Indonesia, Bapak dibentuk untuk sebagai pengawas apa yang beredar di Indonesia, apa yang beredar di masyarakat, yang menjamin itu tugas Bapak. Menurut saya kehadiran bapak memang masih kurang karena tadi teman-teman semua sudah sampaikan bahwa Bapak masih kurang diperkuat dengan hukum. Tapi apapun itu bapak adalah wakil negara, Bapak harus bertanggungjawab kepada itu semua. Kami di Papua adalah tempat tong sampah untuk makanan-makanan, obat-obat yang beredar disana. Kalau Bapak lihat koran-koran lokal di Papua itu sangat banyak sekali suplemen atau obat-obat yang beredar disana, yang dari luar masuk itu diiklankan begitu, banyak sekali, dan menurut saya itu pasti belum melewati kajian dari tempat Bapak sebagai penanggungjawab peredaran obat-obat itu. Dan makanan-makanan yang beredar, makanan-makanan kecil dari luar, kita liat semua yang beredar dari sana itu dari luar, dari Cina dari mana-mana ya. Dan itu di Jawa saya nggak lihat, tapi ada di sana itu. Kehadiran BP POM di Papua khususnya menurut saya belum ada, saya minta perhatian bapak ya.

Yang satu lagi bahwa di sana ada Kabupaten kota yang ada di tengah-tengah pegunungan, itu kalau mereka mau makan hasil laut itu sangat susah karena kita tahu transportasi kesana susah ya kan, jadi pengawasan itu pun susah. Yang beredar dari sana tidak terdeteksi seperti apa pengawasannya ya, karena dia akan naik pesawat, untuk bicara soal bagaimana menjadi kesegaran itu pun susah karena hubungan itu sangat terbatas ya. Jadi pasti harus ada cara-cara tertentu yang bisa menjaga supaya dia tidak rusak.

Nah ini apakah cara-cara yang dipakai ini sudah benar apa belum? Nah itu pengawasannya belum ada. Maka menurut saya harus ada juga Badan POM di tempat sana terutama di daerah Wamena karena itu hampir semua pintu masuk ke pegunungan itu di sana. Tadi Bapak sampaikan ada pengawasan di daerah-daerah perbatasan, ada di Merauke. Kalau Merauke itu tidak ada jalan darat yang sekarang bisa dari perbatasan ya dari ... masuk, kalau di Jayapura ada pak, itu lintas batas setiap saat lewat di sana. Maka mungkin yang penting harus ada di sana ya kan, karena itu langsung ada lintas batasnya. Ada, tiap hari ada, masuk keluar dari sana, jadi itu belum ada disana pak.

Yang berikut Pak kita lihat bahwa kalau setiap kali hari besar lebaran, tahun baru itu ada gerakan BP POM, ada kita lihat gerakan, nah setelah itu tidur. Tugas Bapak ini kan pengawas maka saya kira tugas yang paling penting itu ada di lapangan gitu, bukan ada di dalam ruangan, ada dilapangan yang mengawasi, membuat, selalu memberikan, tadi teman-teman sudah menyampaikan harus banyak memberikan informasi kepada masyarakat, Bapak harus bisa juga bekerjasama dengan Departemen Perindustrian. Kalau kita bicara jujur apa pun yang harus dihasilkan oleh industri sebelum itu beredar harus melalui ujicoba di tempat Bapak, dapat sertifikat dari bapak baru boleh beredar, karena yang bertanggung jawab semua adalah Bapak Bagaimana pun tidak boleh lepas, maka menurut saya melalui Komisi IX 9 kami harus memperkuat lagi BP POM, mendorong lagi BP POM agar diperkuat untuk bisa lebih mempunyai wewenang yang lebih besar.

Sebentar lagi kami memasuki era Mea ini pasti lebih banyak lagi banjir produk-produk dari luar, dan itu tugas Bapak untuk bisa menjaga itu. Sekarang saja

banyak suplemen yang beredar begitu mahal tapi tidak melalui saya lihat tidak melalui BP POM. Produk-produk itu keluar melalui multilevel yang begitu, buka cabang di Indonesia, produknya itu sangat mahal, satu paket bisa sampai 30-an juta segala macam, ini apakah sudah melalui Bapak? kami juga masih lihat di TV beredar itu ya kan? Semua ada klinik-klinik dari luar muka ini apakah itu sudah melalui tempat Bapak?

Jadi ini yang mungkin Komisi IX kami harus juga bisa memperkuat Badan POM ini agar mungkin bisa punya wewenang yang lebih besar menurut saya agar Bapak bisa benar-benar menjaga masyarakat Indonesia tidak menjadi tempat sampah untuk semua produk yang akan bisa kami. Kami keluar negeri ke Australia kami bawa makanan turun saja ditahan nggak boleh, makanan dari pesawat turun nggak boleh, dibuang, tempat kami sangat bebas. Nah ini yang mungkin menurut saya kita harus juga memberikan perkuat tadi teman-teman sudah sampaikan saya kira kita sepakat, kita semua punya kepedulian terhadap itu. Tapi yang paling penting bagi saya tolong Bapak sebagai pengawas itu melihat anak-anak kami karena anak-anak kami itu adalah penerus bangsa kami ke depan.

Kami lihat disekolah-sekolah, kalau disekolah yang elit-elit itu mungkin tidak terlalu ya, tapi di sekolah-sekolah yang kumuh itu beredar makanan yang tidak layak, anak-anak itu makan. Itu makanan yang dibuat pedagang-pedagang itu nggak layak itu, ini tugas Bapak untuk mengawasi itu, ya kan. Dibikin menarik warna-warna itu warnanya tidak jelas itu bahannya, ya kan cuma supaya menarik anak-anak itu menarik dikasih makan, jadi anak-anak itu dibikin kayak binatang, ikan kalau dibikin umpannya menarik dia makan, ini tugas bapak untuk itu, di Jakarta masih banyak, apalagi di pelosok-pelosok. Saya sering ke pelosok-pelosok lihat anak-anak sekolah kalau keluar dari sekolah itu waduh itu minuman warna-warnanya, es itu warnanya wah ini warna apa yang dipakai? Ini tugas bapak harus bisa menjaga itu semua. Kita menaruh harapan besar untuk bapak bisa menjaga mulai dari anak-anak kami yang di sekolah-sekolah dasar tolong diprotect mereka, mereka adalah masa depan bangsa kita. Jangan nanti, besok separuh itu sudah kena kanker. Kita tahu bahwa sekarang lihat tingkat kematian kanker besar sekali di Indonesia, penyakit-penyakit gagal ginjal, kami Papua sekarang gagal ginjal sangat besar karena itu.

Saya ingin sampaikan, ini bukan ini, ini Ibu saya sendiri yang kena dengan salah satu produk akhirnya dia gagal jantung, itu yang sekarang banyak, dan itu di Papua banyak yang kena obat itu. Saya sebutkan bahwa itu herballife, herbalife itu kena, ibu saya kena, ada satu lagi kakak saya ternyata bisa dia kuras habis kekurangan garam dan gagal jantung, 6 bulan kena gagal jantung, 6 bulan koma di rumah sakit, baru meninggal karena minum itu, tapi sampai sekarang saya lihat masih beredar, dan waktu kami periksa di dokter kami sampaikan ini yang diminum gitu, dokter sampaikan ini tidak baik, tapi tindak lanjutnya tidak ada gitu, harusnya dokter itu sampaikan bahwa ada pasien kasusnya ini bahwa ini tidak baik gitu. Kami tahu sekarang ibu-ibu di Papua banyak yang besar-besar, gemuk-gemuk kan? Cari cepat ini ya minum itu dia, promosikan disana karena itu kena. Ini banyak kasus tapi masih bebas berjalan, mobil masih tulisannya besar-besar, apakah ini karena setorannya bagus laku, jadi dia boleh bebas beredar. Saya mohon perhatian bapak untuk bisa melihat itu.

Jadi banyak masih kita harus berikan dukungan tapi Bapak juga harus bisa bekerja yang benar ya kan. Kalau kita mau jujur kita ke Glodok sana obat-obat itu beredar disana tidak ada itu yang kenal, saya sudah kesana pak saya lihat. Paling banyak kalau kita bicara jujur yang supply ke Republik ini ada di sana gitu, Bapak

nggak usah ke daerah, pintunya ada di sana disana saja lihat, kosmetik yang tidak benar beredar daerah asalnya semua dari sana, Glodok saja sana, kalau orang bicara tekstil ke Tanah Abang, kalau bicara obat ini ke Glodok, Pramuka, tapi itu semua dari sana paling banyak Glodok. Mungkin saya usulkan sekali kita bikin Kunker ke Glodok untuk lihat itu obat-obat beredar. Kosmetik itu semua dari sana Pak, dari sana baru dia beredar ke daerah. Jadi Bapak tidak usah terlalu jauh-jauh ke daerah lagi, bapak tutup disitu tahan semuanya, tidak masuk.

Jadi mungkin itu saja dari saya. Atas perhatian teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Sekarang pukul 13 lewat 5 menit, sesuai dengan kesepakatan kita tadi kita akan break, tapi masih beberapa anggota lagi tercatat 3 orang lagi. Saya kira kita habiskan dulu semua pertanyaan-pertanyaan baru kita break ya. Oleh karena itu kita tambah 15 sampai 20 menit untuk memberi kesempatan kepada anggota yang akan menyampaikan pertanyaan, ya kita tambah ya?

(RAPAT : SETUJU)

Baik.

Yang selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Ketut Sustiawan silakan.

F-PDIP (Ir. KETUT SUSTIAWAN):

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati., Kepala Badan POM dan jajarannya yang saya hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua.

Saya Ketut Sustiawan, Fraksi PDI Perjuangan A-150 Dapil Jawa Barat I, kota Bandung kota Cimahi.

Jadi kehadiran BP POM ini tadi temen saya juga dari Jawa Barat, di Jawa Barat saja belum banyak terdengar, apalagi di Papua di tempat Pak Robert. Jadi saya kira bahwa badan POM ini memang harus hadir di seluruh negeri ini gitu loh. Karena tugas Badan POM yang melaksanakan tugas negara melaksanakan tugas pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahan obat dan makanan ini saya

kira ini hal yang sangat penting bagi kita semua. Saya ingin menggunakan kesempatan ini, sudah banyak teman-teman yang menyampaikan ada 3 hal Pak Kepala Badan yang pertama terkait dengan kelembagaan, yang kedua soal anggaran, dan yang ketiga soal pengawasan. Soal kelembagaan ini tadi diawal Pak Kepala Badan POM menyampaikan permohonan dukungan terhadap penguatan kelembagaan Badan POM.

Tentu secara lebih detail saya ingin melihat, mendengar apa sesungguhnya yang diharapkan ke depan BP POM ini sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Keppres 103 Tahun 2001 yaitu tentang tugas, fungsi, kewenangan susunan organisasi dan tatakerja lembaga pemerintah nondepartemen. Di dalam Keppres ini memang ada 25 badan dan lembaga, salah satunya adalah Badan POM yang hanya diatur hanya mungkin hanya sekitar 4 pasal tapi ini juga cukup jelas itu apa tugas dan apa kewenangannya. Namun demikian dalam penguatan kelembagaan ini saya setuju kalau ini juga menjadi bagian dari kesimpulan RDP kali ini, ada 2 hal terkait dengan kelembagaan ini.

Pertama soal regulasi tentu ini ada beberapa Undang-Undang juga yang perlu ada cantolan bagaimana tugas dari Badan POM ini, salah satunya tahun lalu kita juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Di situ juga ada tugas dari Badan POM ini dalam melakukan, menguji bahan untuk sebelum sertifikasi halal ini dikeluarkan. Saya kira ini juga bagian dari tugas Badan POM di situ. Yang kedua dalam hal penguatan kelembagaan ini juga infrastruktur BP POM ini juga yang harus dibangun, tadi kita memiliki balai besar hanya 33, Pospomnya juga perlu kita perkuat terutama daerah-daerah perbatasan. Walaupun demikian yang terkait daerah perkotaan juga sangat banyak persoalan sebetulnya terkait dengan peredaran obat, obat-obat tradisional, produk kadaluarsa, belum jajanan anak sekolah dan sebagainya.

Saya kira penguatan ini juga perlu dilakukan disamping peningkatan SDM dan dan peralatan laboratorium yang tadi ya membanggakan bahwa laboratorium POM ini juga akreditasinya yang terbaik, tapi saya kira di Pospom dan sebagainya kita perlu lebih, apalagi kalau dikaitkan tadi kalau implementasi Undang-Undang 33 Tahun 2014 ini dilaksanakan, ada kewajiban walaupun ada yang voluntary, ada yang mandatori bahwa industri kecil menengah juga wajib diperiksa apa dilakukan uji. Jadi saya kira sangat banyak hal yang yang menjadi bagian dari penelitian dan uji tadi. Itu yang pertama.

Yang kedua terkait dengan program dengan anggaran ini, kalau kita melihat tahun 2015 ini ada 3 program pokok di Badan POM dengan alokasi anggaran sekitar 1,2 trilyun itu total. Sehingga dari sisi anggaran tadi Pak Chairul juga menyampaikan dari tahun ke tahun kelihatannya tidak signifikan ada peningkatan anggaran ini. Sehingga kita perlu melihat apakah fungsi dan kewenangan dari Badan POM ini sudah dilakukan sesuai dengan ini terjabarkan dalam program anggaran yang diusulkan oleh Badan POM.

Terkait fungsi, misalnya pengkajian penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat makanan, pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat makanan, koordinasi kegiatan fungsional. Jadi saya kira itu tadi dengan daerah, kabupaten kota termasuk pemantauan pemberian bimbingan, pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan. Jadi saya kira kegiatan pelibatan masyarakat ini memang jadi dibutuhkan, termasuk ada dalam fungsi yang kelima adalah penyelenggaraan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan sebagainya sampai ke ke persoalan perlengkapan

dan rumahtangga. Dari pelaksanaan fungsi Badan POM ini juga ada kewenangan, paling tidak ada 6 kewenangan yang diamanatkan dalam Kepres 103 ini yaitu penyusunan rencana nasional bidang pengawasan obat makanan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sistem informasi, nah saya kira ini perlu.

Jadi kita juga mengingatkan bahwa ada kewajiban badan publik untuk memberikan informasi secara terbuka kepada publik yang terkait dengan kepentingan-kepentingan publik sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ini juga hal yang menjadi kewajiban dari badan publik untuk memberikan informasi secara luas dan terbuka sehingga informasi ini bisa didapat dengan cepat seperti tadi contoh soal apel ya, soal apel terkontaminasi bakteri sehingga kita juga jadi tahu, apakah betul apel yang kita makan dari mana? jangan-jangan masyarakat juga nggak tahu apel kita ini apel darimana. Yang jelas apel Indonesia nggak ada yang berwarna merah, sudah beda, apel kita ya warnanya hijau. Ya jadi saya kira itu.

Dan yang terakhir tadi soal pelibatan soal pengawasan bagaimana masyarakat terlibat secara aktif, jadi kalau didalam buku ini, didalam rapat ini salah satunya adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Badan POM melalui program komunikasi informasi dan edukasi.

Jadi saya kira ini yang kami mohon informasi dan evaluasi terhadap program yang terdahulu tahun 2014 dan juga harapan bagaimana kita secara sinergi bisa melakukan sosialisasi, komunikasi, edukasi ini kepada masyarakat dengan pelibatan secara aktif anggota Komisi IX didalam kegiatan-kegiatan Badan POM ini sehingga kita bisa menyebarkan informasi yang baik yang dibutuhkan oleh masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Saya kira problematiknya saya kira juga cukup besar di baik wilayah kota maupun wilayah pedesaan.

Saya kira ini yang perlu saya sampaikan sehingga tadi kalau diawal adanya keinginan untuk membutuhkan dukungan baik penguatan kelembagaan maupun peningkatan anggaran tentu sangat terkait kontan apa yang harus kita persiapkan ke depan, sehingga bisa kita lakukan dengan baik.

Demikian pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Bapak Marwan Dasopang silakan.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Baik terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Marwan Dasopang Fraksi Kebangkitan Bangsa dari Sumatera Utara II, 19 Kabupaten kota luas Dapilnya pak.

**Yang terhormat Pimpinan dan sahabat-sahabat Anggota Komisi IX,
Pak Roy Sparingga Kepala Badan POM Republik Indonesia beserta seluruh staf.**

Kalau membaca penghargaan ini kita harus salut memberikan penghargaan setinggi-tingginya Pak Roy atas kinerja yang dilakukan tetapi kalau kita bandingkan dengan cakupan tugas karena menyangkut obat dan makanan ini adalah keseharian kita, keseharian masyarakat. Maka banyak kasus-kasus yang samasekali tidak tersentuh dengan baik. Saya tidak bisa membayangkan seperti Bang Ali Thaher ini tadi mengatakan kira-kira begini dia sudah tahu kalau hitam itu kulitnya itu tidak bisa berubah gitu, tapi masih bisa diperdaya oleh iklan, ada bedak yang bisa memutihkan. Bagaimana Pak Ketua, Pak Syamsul kalau dengan saya lebih mudah saya dong terpengaruh dengan iklan bisa menumbuhkan rambut gitu kan, karena masih layak tumbuh rambutnya. Bagaimana dengan masyarakat kita yang jauh dari pemahaman apa yang disebut dengan makanan sehat.

Saya hanya ingin mengatakan Pak Roy ini terlalu santun sebetulnya kalau mengingat apa yang dipaparkan oleh seluruh teman-teman tadi itu bagaimana kecakupan luas pekerjaan itu anggarannya kok tidak berubah? Anggaran 2015 seluruh komponen negara ini anggarannya bertambah di APBNP, Badan POM ini kok segitu 1,2 saja yang lain-lain ada tambahannya pak, kenapa tidak ada? Pertanyaannya apakah Pak Roy bersama staf tidak bisa meyakinkan bahwa pekerjaan ini sangat mulia padahal banyak hal yang bisa kita tambah, Balai POM nya kurang, tenaga pengawas kurang, kalau yang kita bayarkan hanya produk yang bisa diregistrasi itu mudah Pak, gampang, itu dievaluasi, tapi kalau yang di pertanyakan tadi oleh bagaimana dengan oplosan, wah bukan bagian kami, kan tidak bisa Pak menyatakan itu tidak bagian urusan Balai POM. Harus juga, karena menyangkut produk yang akan dijamin keamanannya.

Oleh karena itu bisa kita sepakati bahwa payung hukum ini penting untuk Balai POM lebih kuat karena disamping ada dasar hukum yang lebih tinggi berupa Undang-Undang didalamnya itu harus punya daya paksa. Di POM itu harus ada bisa upaya paksa kalau tidak harus melapor lagi, melapor lagi ke Depkes, lapor lagi ke polisi. Yang kita pahami bahwa koordinasi di Republik ini waduh susah sekali, itu belum tertuang dengan baik Pak di mana, padahal itu sebetulnya cukup. Kalau Bang Robert Rouw tadi menjelaskan itu di Papua tidak usah di Papua, wong disini saja luar biasa, Raskin saja bagaimana pengawasan Raskin, banyak pak Raskin tidak layak untuk dimakan sebetulnya. Tapi tidak pernah kita dengar Balai POM itu sudah meneliti kelayakan Raskin. Kira-kira begitu. Itu satu.

Tadi sudah disampaikan mengenai jajanan di sekolah, ya tidak layak tapi kan pengusaha kecil itu tidak boleh mati juga, kira-kira apa yang dilakukan terhadap pengusaha kecil itu? Upaya apa itu tidak jelas juga seberapa besar itu angkanya disetiap sekolah, di seluruh Indonesia berapa, dan apa yang kita lakukan kan harus ada dibina itu Pak. Nggak boleh juga dibinasakan, mereka kemana makannya kalau nggak jualan, anak-anak itu ya tadi, gampang asal bisa mengenyangkan pasti dibeli, kira-kira begitu. Kalau bisa dibuatkan dengan program yang cakupan luas ini kira-kira anggarannya berapa? Saya ingin menegaskan itu lagi, Pak Chairul tadi sudah menyampaikan itu kalau kita disini sebetulnya ya sudah regulasinya apa, anggarannya berapa, penguasaannya kira-kira begitu. Kalau semulia ini pekerjaannya bapak tidak menyodorkan tambahan program dengan baik tentu kita bertanya juga kesungguhan bapak untuk pekerjaan yang mulia ini. Kalau Bang Robert Rouw tadi mengatakan wah ini tanggung jawab bapak, kan kira-kira begitu.

Coba dijelaskan ke kita dan kira-kira apa yang harus di tapi setiap akhir dari penjelasan ini minta dukungan, nah yang mana yang mau didukung? Programnya nggak ada tambahan pak, saya melihat sebetulnya tidak cukup kalau hanya infrastruktur yang ada dengan sumberdaya manusia yang ada bapak tidak cukup, tidak kuat karena seluruh lapisan ini akan terjadi persoalan makanan dan obat ini.

Oleh karena itu butuh kelompok-kelompok yang menjadi ujung tombak Pak, kalau hanya ada penyidik 500, ada Pospom dibutuhkan ada kelompok-kelompok yang menjadi ujung tombak. Jadi masyarakat itu tidak lagi menjadi objek yang akan kita berdayakan, tapi sudah ada masyarakat yang berdaya yang bisa menjadi ujung tombak, kelompok-kelompok di desa-desa. Kalau ada kelompok-kelompok yang menjadi ujung tombak kan harus ada biayanya, lah ini nggak ada program ini yang seperti ini. Nah kalau ini bisa dibuat kerjasama dengan Komisi IX saya pikir sangat baik, kita kalau Reses ke daerah ini pertanyaannya banyak sekali yang nggak bisa kita jawab. Lah kalau ada kelompok-kelompok yang menjadi tombak alarm di sana itu bisa terdeteksi. Maka yang tidak diregistrasi itu cepat ada laporan lah kalau menunggu ada registrasi nggak akan dapat pak. Oplosan, ada jajanan, tapi kalau ada kelompok-kelompok yang menjadi ujung tombak Balai POM yang bukan menjadi apa namanya pegawai di POM, pemberdayaan masyarakat itu saya pikir ini lebih baik.

Saya pikir itu usulan Pak Ketua. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya yang kami hormati Ibu Andi Fauziah, kami persilakan.

F-PG (Drg. Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, SKG):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati,
Kepala Badan POM Republik Indonesia beserta jajarannya yang saya hormati.**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Selamat siang,
salam sejahtera buat kita semua,
Omswastiastu .**

Tadi sudah banyak rekan-rekan saya memaparkan bagaimana sih harusnya BP POM ini ke depannya. Saya mungkin hanya menambahkan beberapa hal, tidak banyak sedikit saja Pak. Dari data yang saya peroleh bahwa pada tahun 2013 menunjukkan bahwa pengambilan sample dan uji laboratorium terhadap 24.906 sample pangan menunjukkan bahwa masih terdapat 3.442 *sample* atau sekitar 13,82% yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan.

Karena didalam sample tersebut masih terdapat bahan berbahaya sebagai bahan tambahan pangan seperti borax, rhodamine b, formalin, metanil yellow, auramin dan bahkan masih ditemukan sample yang positif mengandung bahan obat kimia sildenafil dan tadalafil.

Persoalannya adalah dari mana sih kok bisa ada produksi dan rantai distribusi bahan-bahan bahaya tersebut? Kalau menurut saya pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi bahan-bahan berbahaya tersebut khususnya sebagai bahan tambahan pangan mesti dilakukan pengawasan yang lebih ketat, lebih ketat daripada yang sudah dilakukan sekarang. Dan ditambah dengan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap sarana produksi dan distribusi ini jika memang terbukti adanya penyalahgunaan.

Yang selanjutnya saya hendak menambahkan tentang obat-obatan tradisional yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya ibu Irma Chaniago. Saya mengapresiasi baik penanganan dari BP POM terhadap obat-obatan tradisional, saya juga melihat bahwa di masyarakat kita pada akhir-akhir ini ada trend yang mengemuka bahwa kepercayaan masyarakat pada obat-obatan tradisional itu meningkat atau semakin tinggi dari hari ke hari. Pada kasus ini atau pada hal ini kita mungkin bisa belajar dari negara kubah dimana negara tersebut mengalami embargo ekonomi salah satunya adalah embargo bahan obat-obatan kimiawi tetapi kubah tidak pernah menyerah pada situasi yang mereka alami dan kemudian mengembangkan obat-obatan berbahan herbal.

Sehingga pada saat ini kubah dikenal sebagai salah satu negara dengan layanan kesehatan dan obat-obatan yang terbaik di dunia. Saya tidak menganggap bahwa kita harus mereduplikasi model kubah untuk masuk ke Indonesia tetapi kita perlu belajar tentang *success story*-nya yaitu bagaimana kita mengembangkan obat-obatan herbal tersebut, dimana obat-obatan tradisional khususnya yang berbahan herbal mendapatkan pembinaan yang lebih baik sebagai tindak lanjut dari pengawasannya. Sehingga menurut saya bagaimana BPOM menyusun sertifikasi yang bersifat hierarkis atas tidak saja sarana tetapi obat-obatan tradisional itu sendiri sehingga dapat merangsang pertumbuhannya sendiri. Menurut saya ini juga sangat penting karena Indonesia adalah negara yang sangat potensi dengan obat-obatan tradisional ini juga saya anggap sebagai potensi kita dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.

Yang terakhir tentang masyarakat ekonomi ASEAN yang kita tidak bisa memandang enteng atau kita tidak bisa menggampangkan hal ini implikasi yang kita dapat dari pelaksanaan Mea nanti adalah masuknya obat-obatan yang ilegal yang mungkin tidak cocok dikonsumsi oleh masyarakat kita. Sehingga menurut saya perlu diantisipasi atau diciptakan bagaimana langkah pencegahan dengan penguatan kerjasama kelembagaan yang memang perlu ditingkatkan khususnya dengan bea cukai yang menjadi salah satu detektor dan filter awalnya atas barang-barang yang dari luar. Menurut saya kerjasama dengan beacukai sangat penting terkait perluasan spektrum bahan dan obat-obat serta zat-zat terlarang seperti obat terlarang atau narkotika golongan satu obat-obatan yang mengandung dekstrometorfan dan carisoprodol dan obat-obatan tradisional ilegal. Yang kita lihat bahwa dari hari ke hari semakin membanjiri pasar Indonesia.

Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan kepada pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya dan terakhir dari Anggota Bapak yang terhormat Bapak Zulfikar silakan.

F-PD (Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD):

Saya selalu penutup.

Yang saya hormati Ketua Wakil Ketua, Para Anggota Komisi IX yang saya hormati.

Dan kepada adik saya, saya bangga dengan Pimpinan yang masih muda ini, karena saya jadi pemimpin dulu sudah tua, sayang, jadi melihat adik ini prospeknya masih panjang ini. Semoga berhasil dan seterusnya sampai pensiun jangan ganti-ganti ini menjadi kepala badan ya. Oleh sebab itu saya menyorot kepemimpinan, saya tahunya Badan POM ini setelah ya sekali-sekali melihat di televisi.

Kedua setelah saya masuk di DPR baru oh penting Badan POM ini. Kalau dulu saya sendiri yang jadi Badan POM, waktu saya menjadi kepala daerah, karena saya sendiri yang turun.

Jadi saya nama Haji Zulfikar Achmad Dapil Jambi dari Partai Demokrat, mantan Bupati dua periode. \

Jadi adindaku jadilah seorang pemimpin yang mempunyai keberhasilan, orang lain puas dengan apa yang kita kerjakan, kepuasan batin kita sendiri, terobosan sangat penting sekali. Seorang pemimpin itu harus mempunyai program belum ada orang tahu kita sudah membuat program itu, keberhasilan itulah yang menjadi kita sendiri, jadi adinda ini mewakili sama dengan Presiden tentang Balai POM ini ya kan, seluruh Indonesia. Kalau saya dulu kan hanya daerah kabupaten yang saya pimpin Kabupaten Bungo Propinsi Jambi, itu pun masih ada juga riak-riak yang tidak puas. Seorang pemimpin harus tegas iya atau tidak, jangan ragu-ragu, kalau saya jadi Presiden mungkin masalah KPK dengan anu sudah selesai saya bikin itu. Nah jadi cuma nasib saja yang belum ini. Jadi *alhamdulillah* sudah jadi anggota dewan juga puas juga, saya pikir bagaimana ini membela rakyat ini, masyarakat ini untuk ke depan. Jadi saya dari awal sudah melihat aura adinda ini memang ada aura kepemimpinan. Kepemimpinan bukan karena muda dan tua, anda jabatan ada wibawa, ada wibawa ada jabatan gitu ya.

Itu yang perlu dipegang. Sebab kadang-kadang jabatan sudah tinggi nggak punya wibawa, ada orang yang wibawanya hebat jabatannya nggak ada juga jalan, itu menunjuk manajemen itu adinda. Adinda ini suku mana ini dari Medan darimana ini? Manado? Campur? Jawa? Jadi karena tugas adinda ini adalah pengawas tingkatkan itu, yang diawasi ini di seluruh Indonesia adinda, di seluruh Indonesia, kenapa kok nah berapa tahun sudah menjadi kepala ini? Satu tahun, Ya taruhlah masih ini ya masih tahap tahap menjajaki ya.

Jadi saya sangat berharap sekali dengan adinda ini pengawasan ini sangat penting, saya setiap ini mau beli, mau belanja di pasar di supermaket atau mau makan sudah tahu saya yang jualnya kerudungan, tapi tetap saja ya halal apa haram makanan ini? Takut benar karena itu prinsip, akidah itu tidak bisa tawar-

menawar kata Pak Ustadz itu , Pak Ustdaz Kyai haji Ali Thaher. Ini saya usulkan dia pindah ke Komisi VIII ya, banyak rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiroti hasanah.

Jadi sekali lagi adinda , nah ini di televisi saya lihat. Ini pengawasan juga kembali situ ya, beberapa hari yang lalu tukang home industri bikin mie di TV Indramayu itu Kampungnya Ibu Susi itu Pangandaran. Itu ada bikin mie sudah bertahun tahun sudah beberapa kali dicek oleh petugas dilaporkan oleh masyarakat bahwa itu dicampur dengan formalin dia jawabkan apa "sudah sering pak datang yang ngecek kesini tetapi nggak ada masalah, masyarakat juga senang makan itu" itu jawaban yang punyanya. Nah ini kan kembali kepada adinda sebagai kepala Badan POM ini . Nah untuk akan datang adinda ya ya kalau perlu ajak-ajaklah kami ini dan anggaran harus ditambah itu ya Ketua, anggaran harus ditambah itu Ketua. Ini jangan apatis adinda, jangan apa adanya, harus ditambah, nah gunanya nanti yang baik-baik.

Gitu saja, sebab sulit sekali kalau kebijakan sudah salah di dalam ini, padahal itu juga artinya pemakaian uang itu betul-betul dipakai oleh kepentingan tapi pindah kebijakan , nah itu KPK sudah periksa itu, Tipikor sudah periksa itu. Itu hati-hati benar itu, Nah makanya penting sekali pengawasan ini melibatkan kepala daerah masing-masing, itu kalau perlu ada Mou lah dengan kepala daerah. Sebab apa yang saya katakan tadi saya kan baru tahu ada Balai POM, cuma saya orangnya tidak bisa duduk di kantor, nggak bisa saya lewat satu jam itu sudah kelamaan di kantor Bupati itu. Saya selalu keluar , begitu saya ingat wah ini perlu meriksa pasar ini, jadi bukan hanya mau Hari Raya saja ini saya periksa, nggak. Ya kadang-kadang nama obat itu saya nggak ngerti, cuma saya selalu mengecek expired nya, hanya itu.

Dan untuk ke depan petugas pengawas atau penyuluh atau apakah yang namanya dari Badan POM ini untuk didaerah rekrutlah orang daerah itu sendiri, sebab apa, pentingnya adalah bahasa komunikasi itu yang bisa diterima oleh masyarakat situ. Kadang orang Kampung saya itu bahasa Indonesia saja nggak ngerti , makanya saya selalu asal saya turun tiap hari Jumat tidak pernah libur, sampai terakhir Jumat jabatan saya 2011 pertengahan, Senin akan didilantik Wakil saya untuk jadi Bupati kedua, pengganti saya. Saya masih tidur di Kampung di masjid , nah tidur di mesjid, mandi dikali sangat perlu dilayani oleh kepala desa atau apa, nggak perlu saya. Yang penting saya bisa dengan dan saya selalu belajar , sebab di daerah saya itu kampung ini dengan kampung ini berbeda bahasanya, logatnya berbeda, itu saya pelajari. Itulah penyampaian saya.

Nah ini yang penting nanti kalau menerima pegawai untuk bertugas itu terimalah orang asli disitu, jangan bawa dari Jawa ini, kalau bawa bahasa Jawa disitu nggak laku, nggak ngerti. Ini jangan kebanyakan saudaranya adinda saja yang pegawainya diterima, jangan ya. Jangan, dimana saja, di Irian, belajar bahasa Irian. Saya lama juga di Irian Jadi itu saya minta, jadi adakan kerjasama dengan kepala daerah ini sebab kepala daerah tidak ada visi misinya yang mengatakan Balai Pom besok kita jadikan ini, nggak laku di masyarakat. Yang ada itu apa, visi misi untuk jadi kepala daerah itu oh nanti jalan, jembatan, rumah sakit. Nah oleh sebab itu ini dimata kepala daerah kurang trend untuk pengawasan ini, tergantung daripada kepala daerah itu sendiri. Kayak saya, saya selalu peduli , apa yang saya ingat saya jalan, nggak perlu saya dikawal apa ini, nggak perlu. Saya yakin kalau ada terobosan kedepan ini sebagai pemimpin yang berhasil nanti sampai pensiun saya minta dengan Presiden adinda jadi Kepala Badan POM terus ya, dan juga ini supaya Saudara ini bikin Undang-Undanglah untuk sama dengan ini tahap Menteri

lah gitu. Ya dik ya, umur berapa sekarang? Berapa dik? Nah itu pentingnya muda kelihatannya itu, cewek-cewek pada senang begitu.

Terima kasih Ketua. Kurang lebih saya minta maaf.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Seandainya boleh tiga periode, empat periode Pak Zulfikar ini nggak akan bakalan jadi Anggota DPR, lebih suka bersama-sama dengan rakyat.

Baik, dari anggota sudah selesai, sekarang kita pindah ke meja pimpinan . Kami persilakan yang terhormat Bapak Asman Abnur.

WAKIL KETUA KOMISI IX (H. ASMAN ABNUR, SE, M.Si):

Terima kasih Pak Syamsul.

Pak Syamsul ini dari Komisi X sama-sama saya terus Pak jadi nggak pernah pisah ini.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Ketua Pak Syamsul dan semua Anggota yang saya hormati.

Pertama-tama Saya ingin menyampaikan selamat ketemu Pak di Komisi IX karena Badan POM ini sudah 14 tahun saya pikir sudah saatnya untuk ke depan ini menjadi Badan POM yang bukan hanya ngawasi juga punya kekuatan, punya kalau menemukan sesuatu itu sampai tuntas, karena orang kita ini kalau sanksinya kecil nanti dia akan membuat lagi, apa yang telah dia buat itu. Jadi mesti bisa punya satu apa namanya kewenangan untuk melaksanakan sanksi. Nah sebelum bicara masalah tadi program kinerja, saya ingin *side back* dulu nih karena bapak dan kawan-kawan ini menjadi mitra kerja kita kalau nggak salah 5 tahun. Kalau bisa tahun pertama ini tahun kedua berbeda kewenangannya, jadi kita bicara nggak lagi hanya harus berkoordinasi dulu harus menyampaikan sesuatu kepada departemen lain dulu, kemudian baru bapak bisa tuntaskan pekerjaan itu.

Nah tadi saya minta beberapa langkah yang mungkin ini kalau pimpinan dan Anggota Komisi IX nanti sepakat kita konsentrasi bagaimana badan ini menjadi satu badan yang ya seperti dinegara lain. Kalau di Singapur itu ada FPA apa singapore authority . Jadi memang punya otoritas dia semua makanan yang dikonsumsi oleh rakyatnya itu harus lolos dulu dari badan ini karena kaitannya dengan kesehatan. Semua barang-barang impor apapun yang sifatnya yang akan dikonsumsi nggak boleh lepas dari badan ini, kemudian obatpun begitu yang akan dipakai oleh dokter di Singapur atau di negara itu nggak boleh lepas dari pengawasan Bapak, harus lolos dulu.

Nah di sini titik persoalannya saya lihat ini kita mau menjadi sebuah yang besar tentu fondasinya harus kuat. Nah pondasinya kalau menurut saya tidak ada jalan lain adalah Undang-Undang, tadi sepakat sama kawan-kawan disampaikan kita harus tuntaskan Undang-Undang pondasi berdirinya bapak-bapak ini. Kalau gedungnya tinggi kalau pondasinya rendah nanti bapak akan rubuh juga, percuma

kerja program sekuat apa pun pondasinya nggak kuat pasti akan rubuh. Nah saya tadi minta di sekretariat sudah ada rupanya yang namanya draft Undang-Undang inisiatif DPR, nah cuma saya tanyakan sudah sampai mana sudah dua kali periode masalah judul saja belum tuntas, nah ini kan judulnya DIM RUU tentang Pengawasan Ketersediaan Farmasi, sudah dua kali di Baleg dibahas judulnya belum ketemu antara Badan POM, DPR dan pemerintah, belum tuntas buat dua periode artinya 10 tahun. Nah kemudian saya lihat lagi isinya di sini, nah di DIM kita di usulan inisiatif DPR itu ada pasal yang memberikan kewenangan ke bapak.

Nah dalam ini masalah pengawasan dan ikut didalam pengawasan itu, nah kemudian DIM pemerintah pasal itu hilang bahkan Bapak harus lapor dulu ke menteri terkait. Nah artinya dalam pemerintah sendiri belum ada keikhlasan memberikan kewenangan ya tentu ini Departemen Kesehatan pastinya kepada Lembaga bapak ini, ini kerjaan gue kasih loe nih, tolong tuntaskan sampai selesai, tapi disini malah dihilangkan. Secara periodik bapak ngawasannya harus lapor ke menteri, gimana Bapak mau mandiri kalau pasalnya masih seperti ini.

Jadi saya pikir Pak Ketua kita punya tugas berat ini kalau kita berhasil menjadikan badan ini menjadi badan otoritas, otoritas yang memang punya kewenangan di bidangnya makanan dan obat ini. Nah mungkin kawan-kawan ini nggak minder lagi kalau duduk sama kepolisian, duduk dengan Kejaksaan, ini kan ada tadi bapak membuat ada koordinasi Satgas, gimana Bapak membuat Satgas sementara Bapak duduknya di pinggir, tidak leading di situ, nggak akan selesai masalahnya. Nah itu persoalan fundamental yang menurut saya harus kita selesaikan dalam periode ini.

Nah kalau Komisi IX selesai ini Pak Ustadz berarti kita punya prestasi di Komisi IX ini. Nah itu yang pertama menurut saya. Nah yang kedua ini undang-undang yang inisiatif DPR, cuma masalahnya dulu kalau nggak salah saya ini usulannya dari Komisi IX kemudian di Pansuskan, ya kalau di Pansuskan ngelebar dia, sudah termasuk disitu Departemen Perdagangan, lalu Departemen Kesehatan, ya masing-masing departemen sudah nggak mau lagi kehilangan kewenangannya, ya sudah ini kalau bisa kita tarik di Komisi IX, kemudian kita jadikan ini adalah Undang-Undang yang dibahas di Komisi IX, jadi kewenangan kita pak ketua. Nah kalau ini selesai saya yakin kawan-kawan ini lebih PD lagi melaksanakan tugasnya, nah sehingga anggarannya, ya ini kembali saya masuk ke anggaran, ini tahun 2012 bapak mendapatkan anggaran 1,2 triliun, kemudian 2013 dapat anggaran 1,3 triliun terakhir 2015 turun jadi 1,2 triliun. Gimana ngurusin Republik sebesar ini cuma anggarannya segini doang? Untuk operasional saja sudah habis Pak, nah bapak punya 500 penyidik setiap kasus berapa bapak anggarkan anggaran untuk menyidik itu satu kasus? Ijin, 5 juta. Untuk Bapak bolak balik ke daerah menyelesaikan masalah anggarannya saja sudah habis, akhirnya apa, bapak minta tolong ke Departemen Kesehatan, minta tolong departemen yang lain yang terkait di bidang ini, minta tolong kepada Kepala Daerah, kan banyak kepentingan di sini, nah sementara Bapak punya penyidik, nggak akan selesai masalah ini. Nah jadi kalau menurut saya sepanjang ini tidak selesai fundamental ini, pondasi ini kita mau menuntut apapun dari bawah pak semua percuma kalau saya kira pak, nggak akan selesai masalah ini.

Nah maka dari itu saya mengusulkan konkrit saja Pak Ketua ini perlu kita putuskan di rapat internal Komisi IX ini bahwa Undang-Undang pembentukan Badan POM ini harus selesai ditargetkan, kalau tahun ini sehingga tahun kedua kita betul-betul melihat bapak yang ganteng disini, melihat bapak yang PD dan percaya diri duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan departemen yang lain seperti KPK

kan gitu ya pak? Seperti Badan Pemeriksa Keuangan , bapak didengar oleh lembaga yang lain itu, BPJS.

Nah sekarang yang angkat Bapak kalau saya tanya tadi adalah Presiden benar ya pak ya? Keputusan Presiden. Kalau yang usulin masih Departemen Kesehatan ya berarti bapak belum independen, nah kalau perlu kita fit dan proper test dulu yang jadi kepala Badan POM ini lolos *fit and proper test* dari Komisi IX. Nah itu bapak baru hebat, berarti DPR sudah menyetujui bapak.

Saya pikir itu Pak Ketua usulan konkrit saya, ini mudah-mudahan era baru, komisi baru, ada sesuatu yang kita hasilkan untuk untuk badan ini.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Terakhir, ini terakhir betul gongnya Ketua Komisi langsung Kami persilahkan yang terhormat Bapak Dede Macan Yusuf , kami persilakan.

KETUA KOMISI IX (DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T., M.I. PoI):

Terima kasih Pimpinan. Jangan dibalik-balik pak, Dede Yusuf Macan pak.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Kepala Badan yang saya hormati beserta para deputi dan seluruh jajaran.

Saya kira apa yang sudah disampaikan seluruh anggota sudah terangkum semua, saya tadi nyari-nyari mana yang belum disebut, rupanya sudah disebut semua. Saya ingin konkrit saja yang pertama tadi Pak Asman sudah menyampaikan masalah regulasi yaitu RUU tentang kesediaan farmasi dan alat kesehatan serta pengawasan obat.

Nah Pak Asman baru rencana saya sudah masukin jadi prioritas di Baleg pak, sudah selesai, jadi nanti akan dikembalikan lagi ke Komisi IX untuk membahas klausul per klausul, itu yang harus kita kawal bersama, artinya pemerintah bersama Komisi IX nanti akan bersama-sama melihat apa peran-peran apa yang memang akan dimungkinkan oleh Badan pengawas obat dan makanan ini. Kedua pak ini sangat penting sekali, saya kebetulan berasal dari Dapil Jabar II ini Kabupaten Bandung Barat di mana produk-produk makanan rumahan atau industri rumah ini banyak sekali , dan ketika kami turun kepada warga kita berdiskusi, ini kan banyak pak misalnya minuman-minuman buah yang sari-sari stroberri atau mungkin nanas dikemas gitu nah mereka ingin menjadi sebuah industri yang baik tapi selalu mengatakan "Pak ini registrasi untuk Badan POM agak sulit dan mahal. Nah menurut saya Badan POM bukan hanya bersifat seperti *watchdog*, mengawasi saja, tapi bapak harus punya keberpihakan terhadap produk lokal, sebab kalau tidak di dalam Mea ini ini mungkin industri dari luar yang mungkin mereka sudah sertifikasi, packaging nya sudah bagus, sudah melewati ...dan sebagainya itu akan dengan

mudah masuk ke Indonesia sementara produk-produk kita yang lokal yang tadi sari stroberri, dodol wajib dan sebagainya untuk bersaing susah, karena ada hambatan dari yang namanya Badan POM.

Nah saya minta bapak disini buat sebuah kebijakan, apa kebijakannya? misalnya sebelum mereka mendaftar mereka mendapat pelatihan dulu, training dulu, pengetahuan dulu, ya apakah nanti sifatnya pemahaman tentang jenis-jenis bahan-bahan. Karena ini tukang bakso Pak tukang bakso yang sekarang pakai boraks ini nggak satu loh, mungkin banyak dan saya dengar sekarang di pasar sudah bukan hanya bakso lagi, daging sudah di kasih boraks kalau nggak salah ya. Kan ini berbahaya bagi kita semua. Jadi saya setuju dengan teman-teman yang mengatakan bahwa kita perlu ada penyuluh-penyuluh PPNS atau penyidik-penyidik yang lebih banyak, tapi bagaimana mereka mau bekerja kalau ongkosnya cuma 5 juta perkasus? Apalagi di Papua itu saya dulu kita dapat kawan Kunker kesana ya yang di Papua itu, ya kalau dia pergi dari Jayapura ke Jayawijaya 5 juta cuma sekali jalan pak, selesai sudah.

Jadi ini memang dukungan laboratorium, para pegawai-pegawai atau penyuluh atau penyidik atau apapun yang ada di tempat bapak analis itu saya pikir perlu diperhatikan, perlu ditambah dan karena ini adalah Komisi Ketenagakerjaan tolong kesejahteraannya diperhatikan juga, supaya mereka dalam melaksanakan itu, jangan sampai mohon maaf ya kita tidak berpikiran negatif, tapi kadang-kadang Pak yang namanya industri itu kadang-kadang begitu datang penyidik itu daripada menyidik ya sudah selesailah diselesaikan secara adat, kira-kira begitu. Apa akibatnya, ya mungkin karena biaya perjalanan hanya 5 juta, biaya penyidikan sedikit dan sebagainya ya sudah akhirnya diselesaikan secara adat itu tadi katanya. Dan ini terjadi bukan hanya di Badan POM ya saya rasa, ketika saya di Pemda pun saya juga melihat apa lagi urusannya tentang lingkungan hidup dan sebagainya itu banyak yang tidak tuntas di jalan, jadi memang ini anggaran memang sangat diperlukan. Dan kemudian saya tadi ngecek website-nya Pak Roy ya ada namanya www.pom.go.id, lalu kemudian saya cek twitter nya, saya cek juga ke online-nya ya memang kurang aktif Pak. Sudah ada, sudah bagus cuma kurang aktif, sehingga tadi juga di medsos masyarakat menanyakan bagaimana kita ingin melaporkan, gimana kita ingin tahu produk ini benar atau tidak sementara adminnya saja adem ayem saja bininya saja adem-adem saja.

Jadi artinya tolong ini penting, berbicara dengan masyarakat belum tentu kita harus bertemu, itulah gunanya yang namanya media sosial, bagaimana masyarakat ingin melaporkan ada halo 1500-533 atau berapa ya saya barusan saya telepon, silahkan menunggu, ya kira-kira begitulah jawabannya. Jadi ini penting sekali pak, ini penting untuk di update terus. Dan yang terakhir saya pikir jika ada penambahan anggaran yang diinginkan teman-teman, spesifik dulu harus apa? anggaran ini untuk apa? Mau berapa dan untuk apa? Nah saya sarankan yang paling penting adalah tentu itu tadi bagaimana sosialisasi apa itu call center-nya, SMS nya, PO Box nya, medsosnya, sosialisasi melalui televisi. Bapak dan Ibu mungkin tahu ya di salah satu TV swasta itu ada yang namanya investigasi, ya investigasi produk ini produk itu, mestinya itu dilakukan oleh TV station, mestinya itulah yang dilakukan oleh Badan POM.

Jadi silakan mungkin besok mau bikin sebuah serial TV yang hantu-hantuan saja bisa pak, masa Badan POM nggak bisa? Saya rasa pasti bisa, jadi penyidikan ini tanggung jawab kita kepada publik bahwa Badan POM sudah melakukan, memang *cost*-nya besar, biayanya besar tapi negara punya anggaran begitu banyak kok, ini adalah bagian kita untuk mensosialisasikan. Dan juga ya saya pikir

bisa diundang juga tokoh-tokoh masyarakat, Komisi IX saya rasa juga siap untuk mensosialisasikan untuk Badan POM, karena kita ini semua pemakan bakso berboraks ya, dulu waktu kecil-kecil, masih ya sekarang ua? Tapi kita akan sosialisasikan lah mengenai hal-hal ini. Jadi inilah beberapa catatan, pada prinsipnya regulasi sudah kita masukkan tinggal kita kawal nanti dalam rapat-rapat komisi. Lalu yang kedua sosialisasi ini harus digalakkan diperlancar, di update , saya dari tadi saya update terus Badan POM RI, bpom *underscore* ri twitternya tapi nggak dijawab-jawab.

Jadi kelihatan sekali mungkin tidur atau nggak punya pulsa mungkin. Dan juga yang paling penting juga adalah anggaran ini harus dispesifikasi sehingga dalam pembahasan anggaran baik ini APBNP maupun nanti APBN murni, saya pikir nanti kawan-kawan nanti sudah jelas apa terobosan yang ingin dilakukan oleh Badan POM. Mungkin demikian Ketua yang bisa saya sampaikan, saya pikir selanjutnya waktu sudah mencapai kesepakatan dan bisa kita lanjutkan dalam diskusi.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ketua.

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,

Kepala Badan POM ada 4 hal yang menguat tadi dari *statement* Anggota, yang pertama dukungan sangat kuat untuk memperkuat posisi POM. Yang kedua adalah adanya keinginan yang kuat agar ada program-program yang sosialisasi, peningkatan pengawasan dan juga anggota komisi siap memberikan dukungan secara langsung. Yang ketiga adalah program-program yang kira-kira sangat urgent untuk bisa disampaikan oleh POM , sekarang ini saat-saat pembahasan APBNP jadi kalau POM bisa menyampaikan skala prioritas yang segera perlu dibiayai tolong juga diberikan respon kepada forum ini.

Kemudian terakhir tadi adalah tentu langkah-langkah konkrit untuk menyiapkan dukungan tenaga ahli dan sebagainya dalam pembahasan RUU yang terkait dengan penguatan POM tadi.

Saya kira kita akan break dan sambil *break* itu Saudara kepala mempersiapkan respon lebih lanjut apa yang telah disampaikan oleh para anggota tadi. Kita *break* selama 60 menit dan kita kembali pada pukul 15.00.

Terima kasih.

(RAPAT DISKORS)

Ada disiapkan makanan, kita makan siang sama-sama.

Jakarta, 29 Januari 2015
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd,

MUH. YUS IQBAL, SE
NIP. 196707171993031006